



**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
PROVINSI RIAU TAHUN 2025**

SEKRETARIAT DAERAH



**BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024**



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR **23** TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, menyebutkan bahwa rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 12);
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 3);
13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 dan dokumen lainnya yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 JULI 2024

Pj. GUBERNUR RIAU,

S. F. HARIYANTO

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 JULI 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR : 23



DAFTAR ISI

Daftar Isi i

Daftar Tabel ii

Daftar Diagram..... iii

BAB I. PENDAHULUAN I | 1

1.1..Latar Belakang I | 1

1.2..Dasar Hukum I | 3

1.3..Maksud dan Tujuan I | 6

1.4..Sistematika..... I | 6

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT II | 1

DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2023

2.1..Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian II | 1

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Riau

2.2..Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Riau II | 10

2.3..Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi II | 14

Sekretariat Daerah Provinsi Riau

2.4..Review terhadap Rancangan Awal RKPD II | 19

2.5..Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II | 42

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH III | 1

3.1..Telaahan terhadap Kebijakan Nasional III | 1

3.2..Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Provinsi Riau . III | 2

3.3..Program dan Kegiatan III | 7

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT IV | 1

DAERAH

BAB V. PENUTUP..... V | 1

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja II 2 Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Provinsi Riau
Tabel 2.2	Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat Daerah II 10 Provinsi Riau
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah II 11 Provinsi Riau
Tabel 2.4	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah..... II 13 (LPPD) Provinsi Riau Tahun 2015-2022
Tabel 2.5	Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Riau Tahun 2017-2023..... II 13
Tabel 2.6	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Riau II 13 Tahun 2021 -2022 Berdasarkan Aspek dan Komponen Penilaian
Tabel 2.7	Rincian Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Riau..... II 14 Tahun 2023
Tabel 2.8	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah..... II 14 (SAKIP) Provinsi Riau Tahun 2022-2023
Tabel 2.9	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi..... II 15 Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Riau
Tabel 2.10	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024..... II 20 Provinsi Riau
Tabel 2.11	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku II 44 Kepentingan Tahun 2025 Provinsi Riau
Tabel 3.1	Tujuan Dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Riau..... III 6
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat..... III 9 Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Provinsi Riau
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah IV 2 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Provinsi Riau



DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1	Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah	I 2
Diagram 2	Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan..... dokumen RKPD , Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota	I 3



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Perangkat Daerah ini juga merupakan sebuah dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Secara hierarki penyusunan rencana kerja OPD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan;
3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD;
4. Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas perangkat daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, progam dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran;
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD;

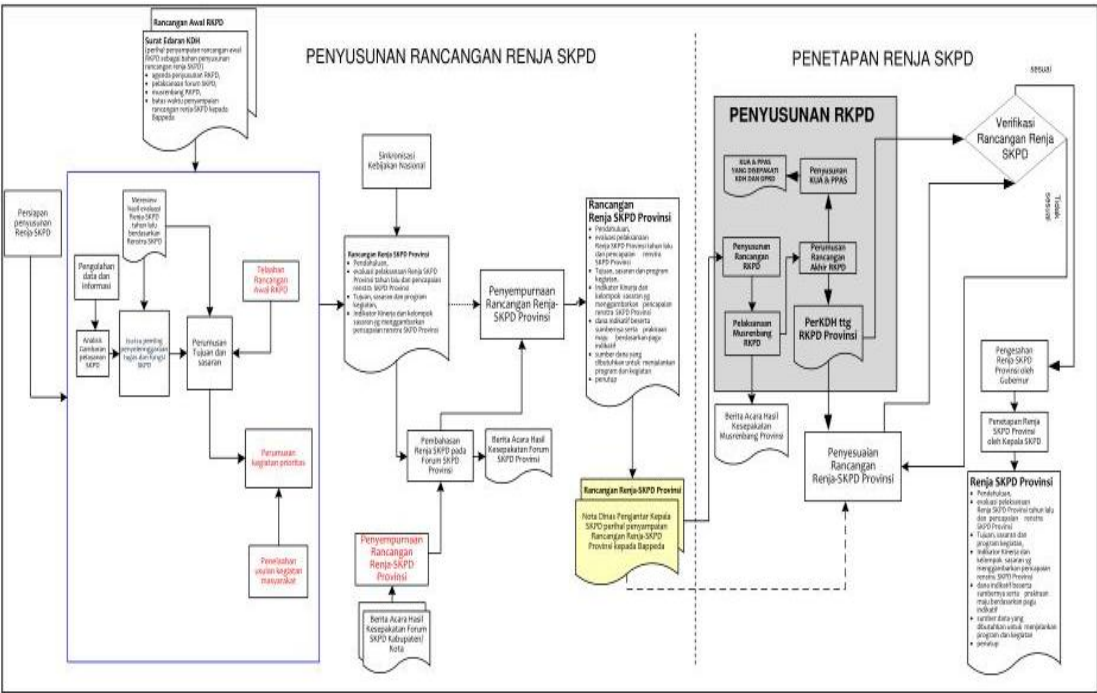


**RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2025**

6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Untuk lebih jelas dapat melihat Diagram 1 dibawah ini.

Diagram 1
Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah



Sekretariat Daerah Provinsi Riau sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintahan Provinsi Riau melakukan proses penyusunan Renja dimulai dengan adanya usulan dari setiap Biro untuk mendapatkan gambaran pelayanan Sekretariat Daerah dalam menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan sudah berdasarkan review hasil evaluasi Renja Sekretariat Daerah tahun sebelumnya serta mengacu pada Renstra Sekretariat Daerah dan didasarkan pada penelaahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau .

Sebagai salah satu dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 disusun melalui skala prioritas sehingga menjamin terselenggaranya pelayanan yang lebih prima sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Renja tersebut dituangkan dalam wujud dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang meliputi dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun), perencanaan jangka menengah (5 tahun) dan perencanaan tahunan, yang saling memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain.

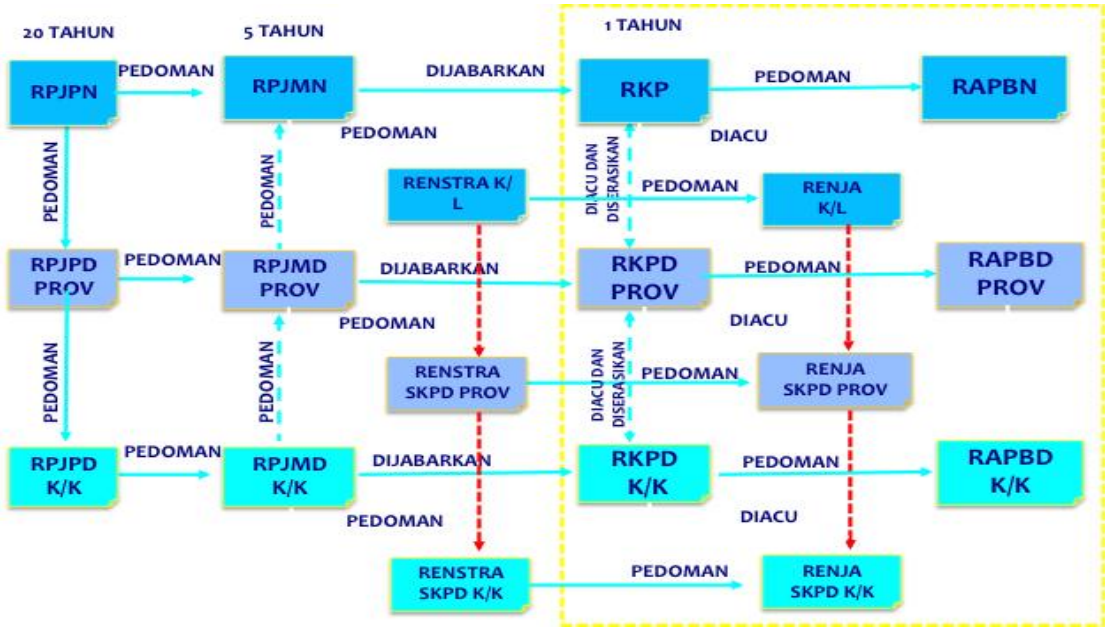


**RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2025**

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 maka Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2026 menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan dan prakiraan maju, serta memperhatikan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD Tahun 2025. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya (n-2 = tahun 2023), juga menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Sekretariat Daerah.

Untuk lebih jelas dapat melihat Diagram 2 dibawah ini.

Diagram 2
Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD , Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota



Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 dimaksudkan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan agar terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan di Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

1.2. DASAR HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai Dasar hukum yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana



RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025

- Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemeirntah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
 16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5)
 19. Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 16 Tahun 2021, tentang Hubungan Kerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 16);



RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025

20. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 53);
21. Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 3);
22. Peraturan Gubernur Riau Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 4);
23. Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 22);
24. Peraturan Gubernur Riau Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 23).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Riau tahun 2025 adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 dan RPD Provinsi Riau di tahun 2025 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Riau tahun 2025 ini adalah :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Riau untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 dan RPD Provinsi Riau di tahun 2025;
2. Sebagai instrument akuntabilitas kinerja di tahun 2025 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan laporan kinerja.



1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renja Perangkat daerah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dengan substansi bab sebagai berikut :

- 1.1. Latar Belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2. Landasan Hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 1.3. Maksud dan Tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian renstra perangkat daerah, analisa kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dengan substansi bab sebagai berikut :

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah menguraikan realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja



program/kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, dan tabel T-C.29

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah menguraikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK dan lampiran table T-C.30
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah menguraikan tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*), Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD menguraikan Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda, lampiran tabel T-C.31.
- 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat menguraikan Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh, penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, lampiran tabel T-C.32.



BAB III Tujuan dan sasaran perangkat daerah memuat telahaan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah, dan program dan kegiatan dengan subtransi bab sebagai berikut:

- 3.1 Telahaan terhadap kebijakan nasional menguraikan tentang penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah menguraikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan menguraikan faktor- faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya, lampiran tabel T-C.33

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup berisikan uraian penutup, berupa

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Riau

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau sebagai penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026 disusun dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran dalam merencanakan aktivitas periode waktu 1 (satu) tahun, guna meyakinkan para pembuat keputusan untuk memberikan persetujuannya, dan selanjutnya digunakan sebagai dokumen acuan untuk pelaksanaan aktivitas yang dilaksanakan pada periode waktu tersebut.

Selanjutnya sebagai bahan acuan dalam perencanaan program/kegiatan tahun 2025 juga dapat dipergunakan hasil evaluasi terhadap Renja Setda tahun 2023 sebagai perbandingan dan acuan untuk renja tahun 2025 yang merupakan renja tahun awal dalam periode Renstra Tahun 2025-2026, Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 serta target akhir periode Renstra Setda Tahun 2024, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Provinsi Riau

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 s/d 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN									
4	1				SEKRETARIAT DAERAH									
4	01	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	01	1	102		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	4 Laporan	2	1	1	100	1	4	100
4	01	1	102	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.180 Orang/Bulan	1.090	545	545	100	545	2.180	100
4	01	1	105		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi	7 Jenis	3	2	2	100	2	7	100
4	01	1	105	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	8 Paket	4	2	2	100	2	8	100
4	01	1	105	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	2	2	2	100	2	6	100
4	01	1	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	20 Jenis	10	5	5	100	5	20	100
4	01	1	106	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3	1	1	100	1	5	100
4	01	1	106	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	180 Paket	80	50	50	100	50	180	100
4	01	1	106	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 Paket	24	12	12	100	12	48	100
4	01	1	106	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	4	4	4	100	4	12	100
4	01	1	106	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.000 Laporan	6.000	3.500	3.500	100	3.500	13.000	100
4	01	1	107		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	6 Jenis	3	2	2	100	1	6	100
4	01	1	107	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	15 Unit	-	14	14	100	1	15	100

Kode					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 s/d 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan											
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)										
1					2		3		4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
4	01	1	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	12	Jenis	6		3		3		100		3		12		100			
4	01	1	108	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48	Laporan	24		12		12		100		12		48		100			
4	01	1	108	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan	24		12		12		100		12		48		100			
4	01	1	108	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	24		12		12		100		12		48		100			
4	01	1	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	14	Jenis	6		4		4		100		4		14		100			
4	01	1	109	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	344	Unit	302		21		21		100		21		344		100			
4	01	1	109	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5.338	Unit	4.174		582		582		100		582		5.338		100			
4	01	1	109	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	198	Unit	106		46		46		100		46		198		100			
4	01	1	111		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah yang difasilitasi administrasi Keuangan dan Operasionalnya	8	Orang	4		2		2		100		2		8		100			
4	01	1	111	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8	Orang/Bulan	4		2		2		100		2		8		100			
4	01	1	111	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	8	Paket	4		2		2		100		2		8		100			
4	01	1	111	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	16	Orang	-		-		-		-		-		-		-			
4	01	1	111	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8	Orang/Bulan	4		2		2		100		2		8		100			
4	01	1	112		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah jenis Layanan kebutuhan Rumah tangga Sekrtariat Daerah yang di fasilitasi	8	Jenis	4		2		2		100		2		8		100			

Kode					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 s/d 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	01	1	112	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	20 Paket	10	5	5	100	5	20	100
4	01	1	112	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	20 Paket	10	5	5	100	5	20	100
4	01	1	113		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah jenis layanan Materi dan Komunikasi Pimpinan yang difasilitasi	12 Jenis	6	3	3	100	3	12	100
4	01	1	113	1	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	480 Dokumen	240	120	120	100	120	480	100
4	01	1	113	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	48 Laporan	24	12	12	100	12	48	100
4	01	1	113	3	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	48 Laporan	24	12	12	100	12	48	100
4	01	1	114		Fasilitasi Keprotokolan	Frekuensi keprotokolan yang difasilitasi	1.440 Kali	720	360	360	100	360	1.440	100
4	01	1	114	1	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	960 Laporan	480	240	240	100	240	960	100
4	01	1	114	2	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	480 Laporan	240	120	120	100	120	480	100
4	01	1	114	3	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	720 Laporan	-	360	360	100	360	720	100
4	1	2			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai nilai RB Baik	100 Persen	100	90	90	100	100	100	100
4	1	2	101		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase perangkat daerah yang sudah sesuai dengan kelembagaannya	100 Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	1	2	101	1	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	132 Dokumen	66	33	33	100	33	132	100
4	1	2	101	2	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	48 Dokumen	24	12	12	100	12	48	100
4	1	2	101	3	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	132 Dokumen	66	33	33	100	33	132	100
4	1	2	102		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase terfasilitasinya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	100 Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	1	2	102	1	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	4 Dokumen	2	1	1	100	1	4	100
4	1	2	102	2	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	4 Dokumen	2	1	1	100	1	4	100
4	1	2	102	3	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	4 Laporan	2	1	1	100	1	4	100

Kode					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 s/d 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	1	2	102	4	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	12 Dokumen	6	3	3	100	3	12	100
4	1	2	102	5	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	4 Dokumen	2	1	1	100	1	4	100
4	1	3			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Terfasilitasinya Penataan Pemerintahandan Otonomi Daerah	100 Persen	80	80	80	100	100	100	100
4	1	3	101		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Tugas Pemerintahan	100 Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	1	3	101	1	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	4 Dokumen	-	2	2	100	2	4	100
4	1	3	101	2	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	7 Dokumen	3	2	2	100	2	7	100
4	1	3	101	3	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	10 Dokumen	6	2	2	100	2	10	100
4	1	3	102		Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Terlaksananya Otonomi Daerah	100 Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	1	3	102	1	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	4 Dokumen	2	1	1	100	1	4	100
4	1	3	102	2	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	4 Dokumen	2	1	1	100	1	4	100
4	1	3	102	3	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	17 Laporan	11	3	3	100	3	17	100
4	1	3	103		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Terfasilitasinya Kerjasama Daerah	100 Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	1	3	103	1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	4 Dokumen	2	1	1	100	1	4	100
4	1	3	103	2	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	4 Dokumen	2	1	1	100	1	4	100
4	1	3	103	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	2 Laporan	-	1	1	100	1	2	100
4	1	4			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat di bidang pelayanan dasar yang dikendalikan	100 Persen	100	100	100	100	100	100	100
						Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat di bidang non pelayanan dasar yang dikendalikan	100 Persen	100	100	100	100	100	100	100
						Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat di bidang bina mental spiritual yang dikendalikan	100 Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	1	4	101		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Terfasilitasinya Pembinaan Mental Spiritual	100 Persen	100	100	100	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 s/d 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	1	4	101	1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	2 Unit	-	1	1	100	1	2	100
4	1	4	101	2	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	29 Lembaga	13	8	8	100	8	29	100
4	1	4	102		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase Terfasilitasinya Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	100 Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	1	4	102	1	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	7 Dokumen	3	2	2	100	2	7	100
4	1	4	102	2	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	3 Dokumen	1	1	1	100	1	3	100
4	1	4	102	3	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	3 Dokumen	1	1	1	100	1	3	100
4	1	4	103		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase Terfasilitasinya Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	100 Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	1	4	103	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	3 Dokumen	1	1	1	100	1	3	100
4	1	4	103	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	3 Dokumen	1	1	1	100	1	3	100
4	1	4	103	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	3 Dokumen	1	1	1	100	1	3	100

Kode					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 s/d 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	1	5			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dilaksanakan	100 Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	1	5	101		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase terfasilitasinya Penyusunan Perundang-Undangan	100 Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	1	5	101	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	240 Dokumen	70	70	70	100	100	240	100
4	1	5	101	2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	1.650 Dokumen	750	450	450	100	450	1.650	100
4	1	5	101	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	324 Dokumen	124	100	100	100	100	324	100
4	1	5	101	4	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	445 Dokumen	205	120	120	100	120	445	100
4	1	5	102		Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase terfasilitasinya Bantuan Hukum	100 Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	1	5	102	1	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	80 Kasus	35	20	20	100	25	80	100
4	1	5	102	2	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	65 Kasus	25	20	20	100	20	65	100
4	1	6			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan di bidang Perekonomian yang dikendalikan	100 Persen	100	100	100	100	100	100	100
						Persentase rumusan kebijakan di bidang pemanfaatan potensi SDA yang dikendalikan	100 Persen	100	100	100	100	100	100	100
						Persentase BLUD yang berkinerja baik	100 Persen	100	100	100	100	100	100	100
						Persentase BUMD yang berkinerja baik	100 Persen	83	83	90	108	100	100	100
4	1	6	101		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Terkelolanya Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	100 Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	1	6	101	1	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	4 Dokumen	2	1	1	100	1	4	100
4	1	6	101	2	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	4 Dokumen	2	1	1	100	1	4	100
4	1	6	102		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Terkelolanya Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	100 Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	1	6	102	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	4 Dokumen	2	1	1	100	1	4	100

Kode					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 s/d 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	1	6	102	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	4 Dokumen	2	1	1	100	1	4	100
4	1	6	102	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	4 Dokumen	2	1	1	100	1	4	100
4	1	6	103		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Terkelolanya Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	100 Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	1	6	103	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	4 Dokumen	2	1	1	100	1	4	100
4	1	6	103	2	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	3 Dokumen	1	1	1	100	1	3	100
4	1	6	103	4	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	4 Dokumen	2	1	1	100	1	4	100
4	1	6	103	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	2 Dokumen	-	1	1	100	1	2	100
4	1	7			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah	100 Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	1	7	101		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	100 Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	1	7	101	1	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan	-	1	1	100	1	2	100
4	1	7	101	2	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	2	1	1	100	1	4	100
4	1	7	101	3	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan	-	1	1	100	1	2	100
4	1	7	102		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100 Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	1	7	102	1	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	4 Laporan	2	1	1	100	1	4	100
4	1	7	102	2	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan	-	1	1	100	1	2	100

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 s/d 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	1	7	102	3	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan	-	1	1	100	1	2	100
4	1	7	103		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Terbinanya dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100 Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	1	7	103	1	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	468 Orang	170	149	149	100	149	468	100
4	1	7	103	2	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Dokumen	2	1	1	100	1	4	100
4	1	7	102	3	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	2 Dokumen	-	1	1	100	1	2	100
4	1	8			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan pembangunan daerah yang dikendalikan	100 Persen	100	100	100	100	100	100	100
						Capaian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	1	8	101		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Evaluasi Pembangunan	100 Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	1	8	101	1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	4 Laporan	2	1	1	100	1	4	100
4	1	8	101	2	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	4 Laporan	2	1	1	100	1	4	100
4	1	8	101	3	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	3 Laporan	1	1	1	100	1	3	100
4	1	8	102		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	1	8	102	1	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	6 Dokumen	2	2	2	100	2	6	100
4	1	8	102	2	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	1	1	1	100	1	3	100
4	1	8	102	3	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	7 Dokumen	3	2	2	100	2	7	100



**RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2025**

Dari tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2023 Sekretariat Daerah Provinsi Riau memiliki 8 program, 28 kegiatan dan 82 sub kegiatan. Untuk capaian terhadap Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 dilakukan konversi terhadap Indikator dan target yang ada di dalam Perubahan Renstra Sekretariat Darah Tahun 2019-2024, berikut disampaikan capaian terhadap Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2023:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Biro Umum dan Biro Administrasi Pimpinan) tingkat realisasi 100 %, pada Program ini terdapat Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dilaksanakan karena kegiatan ini sudah di tanggung sama BPJS.
- b. Program Penataan Organisasi (Biro Organisasi) tingkat realisasi 100%.
- c. Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah tingkat realisasi 100 %.
- d. Program Kesejahteraan Rakyat tingkat realisasi 100%.
- e. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum (Biro Hukum) tingkat realisasi 100%.
- f. Program Perekonomian Dan Pembangunan (Biro Perekonomian) tingkat realisasi 100%.
- g. Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa (Biro Pengadaan Barang dan Jasa) tingkat realisasi 100 %.
- h. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan (Biro Administrasi Pembangunan) tingkat realisasi 100 % .

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Riau

Berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah tahun 2025-2026, Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan daerah	Indeks kepuasan layanan adminsitasi umum dilingkungan Sekretariat Daerah	Nilai
Meningkatnya kualitas layanan pimpinan	Indek Kepuasan Layanan	Nilai
Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan organisasi	Indeks Kelembagaan	Point
	Nilai Sakip	Nilai



RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Nilai EPPD	Nilai
	Persentase SPM	Persen
Meningkatnya efektivitas pengelolaan hukum daerah	Persentase penyelesaian perda sesuai program legilasi daerah	Persen
	Persentase peraturan perundang undangan yang tidak harmonis yang direvisi/dihapus	Persen
Meningkatnya kualitas layanan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa daerah	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Point
Meningkatnya kualitas administrasi dan pengendalian pembangunan daerah	Persentase Capaian pelaksanaan pembangunan (APBD, APBN, Wilayah dan Mandatori)	Persen
Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan	Indeks PMK	Nilai
	Persentase Bahan Kebijakan Umum Pembinaan, Pemahaman, Pengamalan Keagamaan	Persen
Meningkatnya kualitas kebijakan bidang perekonomian	PDB sektor strategis (pertanian, migas, industri) perkapita	Angka

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Provinsi Riau

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat di bidang pelayanan dasar yang dikendalikan			100	100	100		100	100	100		
2	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat di bidang non pelayanan dasar yang dikendalikan			100	100	100		100	100	100		
3	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat di bidang bina mental spritual yang dikendalikan			100	100	100		100	100	100		
4	Indeks Pemerintah Daerah			Sangat Tinggi (3-4)	Sangat Tinggi (3-4)	Sangat Tinggi (3-4)		3.4778	Sangat Tinggi (3-4)	Sangat Tinggi (3-4)		



RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2025

5	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan			100	100	100		100	100	100		
6	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum di Provinsi Riau			100	100	100		100	100	100		
7	Persentase rumusan kebijakan di bidang pemanfaatan potensi SDA yang dikendalikan			100	100	100		100	100	100		
8	Persentase rumusan kebijakan di bidang Perekonomian yang dikendalikan			100	100	100		100	100	100		
9	Persentase BLUD yang berkinerja baik			100	100	100		100	100	100		
10	Persentase BUMD yang berkinerja baik			67	83	100		71.43	83	100		
11	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa			84	86	88		71.6	86	88		
12	Persentase rumusan kebijakan Pembangunan Daerah yang dikendalikan			100	100	100		100	100	100		
13	Capaian Pelaksanaan Pembangunan Daerah			100	100	100		100	100	100		
14	Indek Pelayanan Publik			88,50	89,30	90		94.04	89,30	90		
15	Tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik			85	87	89		90,03	87	89		
16	Persentase terfasilitasinya pelayanan pimpinan			100	100	100		100	100	100		
17	Persentase terfasilitasinya pelayanan administrasi ASN lingkup Sekretaria Daerah			100	100	100		100	100	100		
18	Indeks kepuasan layanan adminsitasi umum dilingkungan Sekretariat Daerah			Puas (skala 66-80)	Sangat Puas (skala 81-100)	Sangat Puas (skala 81-100)		88	Sangat Puas (skala 81-100)	Sangat Puas (skala 81-100)		
19	Indeks kelembagaan			70	75	81		73.79	75	81		
20	Skor Peningkatan Area Manajemen Perubahan			3,13	3,32	3,50		1.79	3,32	3,50		
20	Nilai SAKIP			74,44	76,74	79,04		68.67	76,74	79,04		
22	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Sekretariat daerah			100	100	100		100	100	100		

Berikut ini dapat dilihat Nilai dan Predikat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diperoleh berdasarkan Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.4 dibawah ini:



Tabel 2.4
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Riau
Tahun 2015-2022

Provinsi	TAHUN							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Provinsi Riau	2,6	2,69	2,81	2,92	-	-	3.47	3.4778

Dari data diatas dapat lihat Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Riau pada Tahun 2019, 2020, belum diterbitkan karena Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 belum diterbitkan dan baru diterbitkan lagi untuk tahun 2021 dan 2022.

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi diperoleh berdasarkan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk melihat nilai Indeks Reformasi Provinsi Riau Tahun 2017 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Riau Tahun 2017-2023

INDIKATOR	TAHUN						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Reformasi Birokrasi (indeks)	59,73	60,37	61,49	67,11	67,45	67,63	74,63

Dari data diatas dapat dilihat Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Riau dari tahun 2017 sampai tahun 2023 menunjukkan peningkatan, dimana tahun 2017 dengan nilai 59,73 naik menjadi nilai 74,63 pada tahun 2023.

Untuk melihat rincian hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.6
Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Riau Tahun 2021 -2022
Berdasarkan Aspek dan Komponen Penilaian

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
A.	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20	12,59	12,77
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10	6,93	7,17
	III. Reform	30	14,06	15,26
Total Komponen Pengungkit		60	33,58	35,20
B.	Komponen Hasil			
	1. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10	7,75	7,84



**RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2025**

	2. Kualitas Pelayanan Publik	10	9,4	8,10
	3. Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10	8,42	8,40
	4. Kinerja Organisasi	10	8,3	8,09
	Total Komponen Hasil	40	33,87	32,43
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100	67,45	67,63

Tabel 2.7
Rincian Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Riau Tahun 2023

No	Penilaian	Bobot	Nilai
A	RB General	100	63,33
B	RB Tematik	20	11,30
C	Indeks RB	120	74,63
			BB

Hasil evaluasi tahun 2023 “tidak diperbandingkan” dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan peraturan Menteri PANRB nomor 3 Tahun 2023tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobotdan kriteria penilaian yang signifikan.

Berikut dapat dilihat Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Riau pada Tabel 2.8 dibawah ini:

Tabel 2.8
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Riau Tahun 2022-2023

KOMPONEN	BOBOT	Tahun	
		2022	2023
Perencanaan Kinerja	30	23.25	23.78
Pengukuran Kinerja	30	20.51	20.91
Pelaporan Kinerja	15	10.31	10.60
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15.10	15.22
Nilai SAKIP (Predikat)	100	69.17	70.51
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	BB

Dari tabel 2.8 diatas dapat dilihat Nilai akuntabilitas Provinsi Riau tahun 2023 meningkat dari tahun 2022, dimana tahun 2022 dengan nilai 69.17, naik menjadi nilai 70.51 pada tahun 2023.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah (disingkat setda) adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (disingkat Sekda) merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I b) yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.



**RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2025**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
4. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah
5. Pelayanan fungsi fasilitasi kesetaraan gender di kantor- kantor pemerintah serta menyiapkan infrastruktur terhadap kebutuhan semua gender.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya serta bertanggung jawab kepada Gubernur.

Isu-isu penting yang akan dituntaskan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ada pada Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kebijakan kesejahteraan rakyat untuk pembangunan sumber daya manusia yang beriman dan berkualitas
2. Belum optimalnya kebijakan dibidang pembangunan dan lingkungan hidup serta sumber daya alam
3. Belum optimalnya kebijakan peningkatan perekonomian, kinerja BLUD, BUMD, dan kesejahteraan rakyat dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial
4. Belum optimalnya kebijakan kesejahteraan rakyat dalam pemajuan budaya melayu dan peningkatan pariwisata
5. Masih rendahnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan

Untuk melihat permasalahan dan hambatan dapat dilihat pada Tabel 2.9 dibawah ini:

Tabel 2.9
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Sekretariat Daerah Provinsi Riau

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum Optimalnya Peningkatan Tata Kelola	Belum Optimalnya Kualitas Data Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Belum Optimalnya Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi mengenai Data Penyelenggaraan Pemerintah



**RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2025**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Pemerintahtan	Belum Optimalnya penerapan reformasi birokrasi	Daerah Belum Optimalnya Pelaksanaan evaluasi terhadap data pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah
			Belum Optimalnya manajemen perubahan
			Belum Optimalnya penataan peraturan perundang-undangan
			Belum Optimalnya upaya penguatan kelembagaan
			Belum Optimalnya Penerapan Tatalaksana Pemerintahan
			Belum Optimalnya sistem manajemen SDM
			Belum Optimalnya sistem pengawasan Pemerintahan
			Belum Optimalnya Penguatan akuntabilitas kinerja
			Belum Optimalnya peningkatan kualitas pelayanan publik
			Belum Optimalnya Kinerja Kelembagaan pengadaan barang dan jasa
			Belum Optimalnya Pelaksanaan sistem pengadaan barang dan jasa
			Belum Optimalnya pelaksanaan sistem evaluasi administrasi pembangunan
			Belum Optimalnya Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan administrasi pembangunan dan hasil pembangunan antara instansi terkait
			Belum Optimalnya pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan administrasi pembangunan daerah
			Belum Optimalnya kinerja pelayanan kepada Pimpinan
			Belum Optimalnya kinerja pelayanan administrasi umum dilingkungan Sekretariat Daerah
	Belum Optimalnya Upaya Peningkatan	Belum Optimalnya Peningkatan kualitas koordinasi dan sinkronisasi	Belum Optimalnya Pelaksanaan penyusunan, fasilitasi, Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Kesejahteraan rakyat dan Kerukunan Umat Beragama	kebijakan bidang kesejahteraan rakyat dan keagamaan	terkait kebijakan bina mental spiritual melalui kegiatan keagamaan di masyarakat Belum Optimalnya Pelaksanaan penyusunan, fasilitasi, Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi terkait kebijakan pelayanan dasar Belum Optimalnya Pelaksanaan penyusunan, fasilitasi, Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi terkait kebijakan non pelayanan dasar
	Belum Optimalnya Peningkatan Perekonomian yang Berdaya Saing	Belum Optimalnya Peningkatan kualitas kebijakan bidang perekonomian	Belum Optimalnya Peningkatan pengendalian, perumusan kebijakan Serta melakukan fasilitasi, sinkronisasi, koordinasi dan evaluasi terkait penerapan kebijakan bidang Perekonomian dan Pemanfaatan Potensi SDA Belum Optimalnya Peningkatan Pembinaan kinerja BUMD dan Penilaian kinerja BLUD

Peluang dan hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi selalu muncul sehingga bermuara pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, peluang-peluang tersebut antara lain adalah :

1. Kuantitas Sumber Daya Aparatur yang mencukupi;
2. Komitmen pimpinan;
3. Adanya kebijakan Pemerintah dalam mengembangkan *good governance*;
4. Adanya kebijakan Pemerintah untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
5. Sarana dan Prasarana yang tersedia.

Sedangkan hambatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, antara lain :

1. Kualitas Sumber Daya Aparatur yang masih rendah;
2. Inkonsistensi Kebijakan Pemerintah;
3. Tuntutan pelayanan birokrasi menghendaki aparatur yang semakin profesional dan kompeten;
4. Tuntutan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien;
5. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal;
6. Efisiensi, efektifitas dan produktivitas belum optimal;
7. Transparan dan akuntabilitas birokrasi masih rendah;



RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025

8. Disiplin dan kinerja aparatur masih rendah;

Adanya tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan. Sementara itu kondisi yang dianggap dapat memberikan peluang untuk melaksanakan fungsi atau pengembangan pelayanan adalah:

1. Memanfaatkan Perkembangan teknologi;
2. Memperkuat pola koordinasi lintas instansi;
3. Sinkronisasi aturan dari Undang-undang sampai dengan Peraturan Menteri yang dilakukan di tingkat pusat;
4. Pelaksanaan Otonomi Daerah;
5. Adanya diklat peningkatan kualitas SDM;
6. Peluang untuk pengembangan pengembangan PAD masih cukup terbuka;
7. Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

Selanjutnya adapun yang menjadi isu-isu dalam penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Provinsi Riau yaitu :

- a. Belum optimalnya peran Sekretariat Daerah Provinsi Riau sebagai unsur pembantu Gubernur dalam menjalankan pemerintahan daerah;
- b. Masih lemahnya aparatur dalam berkomitmen sesuai dengan standard operasional prosedur dalam menjalankan anggaran;
- c. Belum maksimalnya penggunaan aparatur untuk menjalankan administrasi perkantoran dan teknis bidang lainnya;
- d. Kemampuan sumberdaya aparatur masih belum optimal dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan;
- e. Tuntutan pelayanan publik yang prima belum optimal;
- f. Cepatnya perubahan instrumen penyelenggara pemerintahan daerah dan sering berubah-ubahnya peraturan pemerintah pusat;
- g. Terjadinya konflik dimasyarakat berkaitan dengan aspek demografis, geografis maupun kondisi sosial politik.

Sekretariat Daerah saat ini harus melakukan berbagai upaya dan pendekatan-pendekatan terhadap isu-isu tersebut, sehingga terjadi koordinasi dan sinkronisasi antara tugas serta kewenangan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Gubernur sebagai berikut :

- a. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan



Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 7);

- b. Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 21);
- c. Eksistensi lembaga Sekretariat Daerah sebagai bagian internal Koordinasi yang Menjadi kebijakan Pemerintah Provinsi Riau Dalam menjalankan Pemerintahan;
- d. Tersedianya sumber daya manusia beserta sarana dan prasarana penunjang fasilitasi pada Sekretariat Daerah Provinsi Riau;
- e. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2026;
- f. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus meningkat.
- g. Tersedianya lembaga pendidikan dan pelatihan di berbagai bidang Teknis.
- h. Keterbukaan informasi merupakan tuntutan masyarakat sebagai wujud dari reformasi birokrasi.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD. Dengan adanya rancangan RKPD merupakan pedoman bagi Sekretariat Daerah Provinsi Riau dalam menyusun rancangan Rencana Kerja dan berfungsi sebagai panduan perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Review terhadap rancangan awal RKPD adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau ulang apakah program dan kegiatan yang sudah disusun dalam rancangan awal RKPD sesuai dengan kebutuhan riil Perangkat Daerah berdasarkan kondisi di lapangan. Hasil review tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.10 berikut ini :

Tabel 2.10
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Provinsi Riau

Daerah: Sekretariat Daerah

Lembar.....dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp)					(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SEKRETARIAT DAERAH				340.774.561.243	SEKRETARIAT DAERAH				371.225.780.715	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				340.106.561.243	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				370.790.851.232	
	SEKRETARIAT DAERAH				340.106.561.243	SEKRETARIAT DAERAH				370.790.851.232	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat Daerah	100 Persen	172.097.555.842	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat Daerah	100 Persen	202.186.619.964	
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	300.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	644.800.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	300.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	644.800.000	
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi	1 Laporan	76.279.069.237	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi	1 Laporan	74.758.076.829	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	545 Orang/ Bulan	76.279.069.237	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	545 Orang/ Bulan	74.758.076.829	
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola	1 Laporan	426.500.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola	1 Laporan	426.500.000	
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	426.500.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	426.500.000	
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi	2 Jenis	356.950.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi	2 Jenis	355.000.000	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	116.950.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	115.000.000	
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	240.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	240.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp)					(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	5 Jenis	10.337.411.997	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	5 Jenis	14.566.612.116	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	600.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	599.997.636	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	2.032.953.780	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	2.032.849.901	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.760.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	3.146.708.109	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	944.458.217	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	1.098.381.470	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3500 Laporan	5.000.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3500 Laporan	7.688.675.000	
F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang	2 Jenis	4.000.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang	2 Jenis	16.402.280.000	
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2.000.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	322.100.000	
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2.000.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	20 Unit	16.080.180.000	
G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	3 jenis	28.280.831.381	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	3 jenis	32.180.170.522	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp)					(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	100.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	100.000.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.650.818.773	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	11.999.999.994	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	19.530.012.608	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.080.170.528	
H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	4 Jenis	11.800.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	4 Jenis	16.020.812.780	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	21 Unit	1.200.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	21 Unit	1.197.440.000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	130 Unit	3.300.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	141 Unit	5.561.260.000	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	582 Unit	2.000.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	582 Unit	2.778.443.780	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	46 Unit	5.300.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	46 Unit	6.483.669.000	
I	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah yang difasilitasi administrasi Keuangan dan Operasionalnya	2 Orang	8.779.154.327	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah yang difasilitasi administrasi Keuangan dan Operasionalnya	2 Orang	9.150.154.327	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	271.154.327	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	271.154.327	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp)					(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	460.000.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	460.000.000	
3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	48.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	48.000.000	
4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	8.000.000.000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	8.371.000.000	
J	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Jumlah jenis Layanan kebutuhan Rumah tangga Sekretariat Daerah yang difasilitasi	3 Jenis	8.915.638.900	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Jumlah jenis Layanan kebutuhan Rumah tangga Sekrtariat Daerah yang difasilitasi	3 Jenis	15.118.325.116	
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	5 Paket	4.522.360.924	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	5 Paket	7.148.850.658	
2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	5 Paket	3.653.277.976	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	5 Paket	6.425.852.458	
3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	4 Paket	740.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	4 Paket	1.543.622.000	
K	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan		Jumlah jenis layanan Materi dan Komunikasi Pimpinan yang difasilitasi	3 Jenis	5.522.000.000	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan		Jumlah jenis layanan Materi dan Komunikasi Pimpinan yang difasilitasi	3 Jenis	5.871.999.975	
1	Penyiapan Materi Pimpinan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	120 Dokumen	272.000.000	Penyiapan Materi Pimpinan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	120 Dokumen	621.999.975	
2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	450.000.000	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	450.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp)					(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	12 Laporan	4.800.000.000	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	12 Laporan	4.800.000.000	
L	Fasilitasi Keprotokolan		Frekuensi keprotokolan yang difasilitasi	360 Kali	17.100.000.000	Fasilitasi Keprotokolan		Frekuensi keprotokolan yang difasilitasi	360 Kali	16.691.888.299	
1	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	240 Laporan	7.600.000.000	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	240 Laporan	9.291.891.169	
2	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	120 Laporan	8.400.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	120 Laporan	5.399.998.540	
3	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	360 Laporan	1.100.000.000	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	360 Laporan	1.999.998.590	
II	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai nilai RB Baik	100 Persen	1.963.517.485	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai nilai RB Baik	100 Persen	2.053.117.012	
A	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Persentase perangkat daerah yang sudah sesuai dengan kelembagaannya	100 Persen	588.193.999	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Persentase perangkat daerah yang sudah sesuai dengan kelembagaannya	100 Persen	588.193.383	
1	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	33 Dokumen	179.342.307	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	33 Dokumen	179.342.117	
2	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	182.333.291	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	182.333.201	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp)					(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Penataan Analisis Jabatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	33 Dokumen	226.518.401	Penataan Analisis Jabatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	33 Dokumen	226.518.065	
B	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		Persentase terfasilitasinya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	100 Persen	1.375.323.486	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		Persentase terfasilitasinya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	100 Persen	1.464.923.629	
1	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	411.999.565	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	411.999.290	
2	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen	429.965.498	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen	429.965.468	
3	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	107.641.948	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	186.838.854	
4	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	3 Dokumen	184.050.964	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	3 Dokumen	194.454.817	
5	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen	241.665.511	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen	241.665.200	
III	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		Persentase Terfasilitasinya Penataan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100 Persen	4.381.004.520	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		- Persentase Terfasilitasinya Penataan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100 Persen	5.014.032.665	
A	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan		Persentase Terlaksananya Tugas Pemerintahan	100 Persen	1.619.400.000	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan		- Persentase Terlaksananya Tugas Pemerintahan	100 Persen	2.252.429.338	
1	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	2 Dokumen	809.600.000	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	2 Dokumen	809.599.434	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp)					(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	2 Dokumen	459.800.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	2 Dokumen	459.799.964	
3	Fasilitasi Penataan Wilayah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	1 Dokumen	350.000.000	Fasilitasi Penataan Wilayah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	2 Dokumen	983.029.940	
B	Pelaksanaan Otonomi Daerah		Persentase Terlaksananya Otonomi Daerah	100 Persen	1.904.704.520	Pelaksanaan Otonomi Daerah		Persentase Terlaksananya Otonomi Daerah	100 Persen	1.904.703.914	
1	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	1 Dokumen	387.364.520	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	1 Dokumen	387.364.288	
2	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1 Dokumen	413.820.000	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1 Dokumen	413.819.745	
3	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Laporan	1.103.520.000	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Laporan	1.103.519.881	
C	Fasilitasi Kerja Sama Daerah		Persentase Terfasilitasinya Kerjasama Daerah	100 Persen	856.900.000	Fasilitasi Kerja Sama Daerah		Persentase Terfasilitasinya Kerjasama Daerah	100 Persen	856.899.413	
1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	1 Dokumen	505.780.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	1 Dokumen	505.780.000	
2	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	1 Dokumen	183.920.000	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	1 Dokumen	183.919.734	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp)					(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	1 Laporan	167.200.000	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	1 Laporan	167.199.679	
IV	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT		Persentase Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Dan Bina Mental Spiritual Yang Dikendalikan	100 Persen	152.285.743.198	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT		- Persentase Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Dan Bina Mental Spiritual Yang Dikendalikan	100 Persen	150.258.855.559	
A	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual		Persentase Terfasilitasinya Pembinaan Mental Spiritual	100 Persen	45.658.743.198	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual		- Persentase Terfasilitasinya Pembinaan Mental Spiritual	100 Persen	34.456.695.010	
1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1 Unit	24.658.743.198	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	4 Unit	13.796.194.010	
2	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	8 Lembaga	21.000.000.000	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	7 Lembaga	20.660.501.000	
B	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		Persentase Terfasilitasinya Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	100 Persen	105.607.000.000	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		- Persentase Terfasilitasinya Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	100 Persen	114.782.160.549	
1	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	2 Dokumen	97.400.000.000	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	2 Dokumen	98.499.960.594	
2	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	1 Dokumen	300.000.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	1 Dokumen	299.999.999	
3	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1 Dokumen	7.907.000.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1 Dokumen	15.982.199.956	
C	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar		Persentase Terfasilitasinya Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	100 Persen	1.020.000.000	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar		- Persentase Terfasilitasinya Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	100 Persen	1.020.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp)					(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	1 Dokumen	362.326.600	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	1 Dokumen	362.326.600	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1 Dokumen	375.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1 Dokumen	375.000.000	
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	1 Dokumen	282.673.400	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	1 Dokumen	282.673.400	
V	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM		Persentase Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum Yang Dilaksanakan	100 Persen	1.983.898.806	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM		Persentase Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum Yang Dilaksanakan	100 Persen	3.041.346.531	
A	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan		Persentase terfasilitasinya Penyusunan Perundang-Undangan	100 Persen	963.490.809	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan		Persentase terfasilitasinya Penyusunan Perundang-Undangan	100 Persen	1.158.170.011	
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	100 Dokumen	352.570.578	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	100 Dokumen	422.570.437	
2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	450 Dokumen	153.145.994	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	450 Dokumen	153.145.733	
3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	100 Dokumen	158.860.619	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	100 Dokumen	231.540.526	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp)					(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	120 Dokumen	298.913.618	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	120 Dokumen	350.913.315	
B	Fasilitasi Bantuan Hukum		Persentase terfasilitasinya Bantuan Hukum	100 Persen	1.020.407.997	Fasilitasi Bantuan Hukum		Persentase terfasilitasinya Bantuan Hukum	100 Persen	1.883.176.520	
1	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	25 Kasus	555.260.809	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	141 Kasus	1.266.888.453	
2	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	20 Kasus	465.147.188	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	20 Kasus	616.288.067	
VI	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Persentase Terkelolanya Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	100 Persen	2.455.000.000	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Persentase Terkelolanya Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	100 Persen	2.956.572.138	
A	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian		Persentase Terkelolanya Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	100 Persen	900.000.000	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian		Persentase Terkelolanya Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	100 Persen	899.999.902	
1	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	1 Dokumen	600.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	1 Dokumen	599.999.964	
2	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1 Dokumen	300.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1 Dokumen	299.999.938	
B	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam		Persentase Terkelolanya Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	100 Persen	525.000.000	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam		Persentase Terkelolanya Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	100 Persen	800.000.000	
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1 Dokumen	150.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1 Dokumen	216.470.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp)					(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	125.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	200.000.000	
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1 Dokumen	250.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1 Dokumen	383.530.000	
C	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD		Persentase Terkelolanya Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	83,33 Persen	1.030.000.000	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD		Persentase Terkelolanya Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	83,33 Persen	1.256.572.236	
1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1 Dokumen	600.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1 Dokumen	600.000.000	
2	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen	100.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen	326.572.236	
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	100.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	100.000.000	
4	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokumen	150.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokumen	150.000.000	
5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	1 Dokumen	80.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	1 Dokumen	80.000.000	
VII	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		Persentase Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah	100 Persen	2.126.300.674	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		Persentase Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah	100 Persen	2.126.260.993	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp)					(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase terkelolanya pengadaan barang dan jasa	100 Persen	689.771.355	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		- Persentase terkelolanya pengadaan barang dan jasa	100 Persen	599.960.319	
1	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	96.061.427	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	149.982.400	
2	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	415.699.614	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	299.999.974	
3	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	178.010.314	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	149.977.945	
B	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Persentase terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100 Persen	848.148.695	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		- Persentase terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100 Persen	826.300.674	
1	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Laporan	696.296.357	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Laporan	600.000.000	
2	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	100.411.612	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	106.300.674	
3	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	51.440.726	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	120.000.000	
C	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase Terbinanya dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100 Persen	588.380.624	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		- Persentase Terbinanya dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100 Persen	700.000.000	
1	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	150 Orang	215.882.841	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	300 Orang	200.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp)					(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	292.202.283	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	350.000.000	
3	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	80.295.500	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	150.000.000	
VIII	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		Persentase Rumusan Kebijakan Pembangunan Daerah Yang Dikendalikan	100 Persen	2.813.540.718	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		- Persentase Rumusan Kebijakan Pembangunan Daerah Yang Dikendalikan	100 Persen	3.154.046.370	
A	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Persentase Hasil Evaluasi Pembangunan	100 Persen	920.578.715	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah		- Persentase Hasil Evaluasi Pembangunan	100 Persen	920.578.136	
1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	1 Laporan	373.242.540	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	1 Laporan	373.242.462	
2	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	1 Laporan	203.245.770	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	1 Laporan	203.245.609	
3	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	1 Laporan	344.090.405	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	1 Laporan	344.090.065	
B	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 Persen	1.892.962.003	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		- Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 Persen	2.233.468.234	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp)					(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	2 Dokumen	203.245.770	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	2 Dokumen	295.927.480	
2	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	460.000.000	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2 Laporan	459.999.921	
3	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1.229.716.233	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	2 Dokumen	1.477.540.833	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				668.000.000	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	-	-	-	434.929.483	
	PENGELOLAAN PERBATASAN				668.000.000	PENGELOLAAN PERBATASAN	-	-	-	434.929.483	
IX	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN		Persentase Terkelolanya Wilayah Perbatasan	50 Persen	668.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	-	Persentase Terkelolanya Wilayah Perbatasan	50 Persen	434.929.483	
A	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama		Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama	100 Persen	170.000.000	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	-	Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama	100 Persen	169.995.715	
1	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	1 Dokumen	170.000.000	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	1 Dokumen	169.995.715	
B	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan		Persentase Terelesaikannya kewilayah di Lokasi Prioritas (Lokpri)	100 Persen	498.000.000	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	-	Persentase Terelesaikannya kewilayah di Lokasi Prioritas (Lokpri)	100 Persen	264.933.768	
1	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	130.000.000	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	129.983.678	
2	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	1 Dokumen	368.000.000	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	1 Dokumen	134.950.090	



Antara rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdapat beberapa Sub Kegiatan yang mengalami perubahan yaitu:
 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah setelah dilakukan analisis kebutuhan untuk pagu anggaran yang ada pada rancangan awal RKPD tidak mencukupi.
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dalam rancangan awal RKPD setelah dilakukan analisis kebutuhan untuk pagu anggaran yang ada pada rancangan awal RKPD dikurangi karena Belanja gaji menyesuaikan dari hasil sandingan pagu belanja pegawai pembahasan TAPD.
 3. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dalam rancangan awal RKPD setelah dilakukan analisis kebutuhan untuk pagu anggaran yang ada pada rancangan awal RKPD dikurangi, dikarenakan 'Isi rincian tidak sesuai dengan target capaian (2 Paket), sesuaikan isi dalam dengan out put targeti.
 4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dalam rancangan awal RKPD setelah dilakukan analisis kebutuhan untuk pagu anggaran yang ada pada rancangan awal RKPD tidak mencukupi, adanya penambahan di item: Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan setda prov riau , Belanja Makan minum Rapat, belanja bahan kimia, belanja Atk, belanja kertas dan cover, belanja benda pos, belanja untuk kegiatan kantor lainnya, belanja Modal kantor lainnya.
 5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dalam rancangan awal RKPD setelah dilakukan analisis kebutuhan untuk pagu anggaran yang ada pada rancangan awal RKPD tidak mencukupi untuk penambahan dikarenakan adanya penambahan di Belanja cetak plakat dikarenakan seluruh OPD meminta pelakat ke Biro Umum.
 6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam rancangan awal RKPD setelah dilakukan analisis kebutuhan untuk pagu anggaran yang ada pada rancangan awal RKPD tidak mencukupi untuk penambahan dikarenakan adanya



- penambahan di item : perjalanan dinas luar negeri, perjalanan dinas luar daerah, Perjalanan Dinas dalam daerah.
7. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dalam rancangan awal RKPD setelah dilakukan analisis kebutuhan untuk pagu anggaran yang ada pada rancangan awal RKPD dikurangi karena Rincian Sewa Kendaraan dihapus tidak sesuai dengan sub kegiatan Rician Jumlah Unit Kendaraan Jabatan disesuaikan dengan target indikator untuk mobil jabatan akan di anggarakan di perubahan 2024.
 8. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dalam rancangan awal RKPD setelah dilakukan analisis kebutuhan untuk pagu anggaran yang ada pada rancangan awal RKPD tidak mencukupi untuk perlu penambahan dikarenakan adanya penambahan target yaitu 3 Mobil Unit untuk Tamu Penambahan mobil BP3AKB 1 Unit Double Kabin dan BPSDM 1 Unit Hi Ace, 10 Unit Mobil Dinas Operasional dan Lapangan, Kendaraan Bus VVIP Karosesi 2 unit, Kendaraan Bus Pariwisata 1 Unit, Kendaraan Hiace Premio Bandara VIP 1 Unit Kendaraan Minibus sport utility vehicle (SUV) Mobil Operasiona 8 Unit, Mobil Pelayanan Samsat Karoseri 2 Unit.
 9. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dalam rancangan awal RKPD setelah dilakukan analisis kebutuhan untuk pagu anggaran yang ada pada rancangan awal RKPD tidak mencukupi untuk biaya listrik yang semulanya baru terakomodir selama 9 bln sehingga butuh tambahan.
 10. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dalam rancangan awal RKPD setelah dilakukan analisis kebutuhan untuk pagu anggaran yang ada pada rancangan awal RKPD tidak mencukupi karena adanya penambahan gaji thl berdasarkan masa kerja khususnya di Operator Komputer.
 11. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dalam rancangan awal RKPD setelah dilakukan analisis kebutuhan untuk pagu anggaran yang ada pada rancangan awal RKPD tidak mencukupi karena adanya penambahan pemeliharaan di item : Biaya



pajak kendaraan sebanyak 60 unit, Pemeliharaan kendaraan dinas ops roda 4 sebanyak 50 unit, Pemeliharaan kendaraan dinas ops roda 6 sebanyak 9 unit.

12. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dalam rancangan awal RKPD setelah dilakukan analisis kebutuhan untuk pagu anggaran yang ada pada rancangan awal RKPD tidak mencukupi karena adanya penambahan di item: Pemeliharaan AC di lingkungan setda (pemerlihaaraan/pergantian kompresor ac, motor fun out door,motor fun in door, pcb, mcb, kontektor ac, kapasitor ac, balting motor sentral, bearing motor, pengisianfreon R22 dan R32), Pemeliharaan AC (sentral, kaset split) Mesjid Agung Annur, Pemeliharaan/Perawatan AC (standing floor, split) di Kediaman Wakil Gubernur Riau, Perawatan Bearing Pompa Ciller, Perawatan lift gedung gabungan 9 lantai (4 unit), Pemeliharaan/Perawatan AC (standing floor, split) di Kediaman Gubernur Riau, Perawatan dan pergantian Toner Mesin Foto Copy dilingkungan Setda Prov.Riau.
13. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dalam rancangan awal RKPD setelah dilakukan analisis kebutuhan untuk pagu anggaran yang ada pada rancangan awal RKPD tidak mencukupi karenaadanya penambahan di item : Pemeliharaan / perbaikan jaringan sound system, Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Ekstention Kantor Gubernur, Perawatan/perbaikan Gedung Utama Kantor Gubernur, Pemeliharaan/Perbaikan Masjid Komplek Kantor Gubernur, Perbaikan Gedung Pertemuan Balai Pauh Janggi di Komplek Gedung Daerah, Perbaikan Gedung Pertemuan Balai Serindit di Komplek Gedung Daerah, Perbaikan Gedung Pertemuan/Serbaguna di Komplek Gedung Dharma Wanita Provinsi Riau, Perawatan Instalasi Air dan Pemipaan Rumah Jabatan Gubernur.
14. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam rancangan awal RKPD setelah dilakukan analisis kebutuhan untuk pagu anggaran yang ada pada rancangan awal RKPD tidak mencukupi karena terdapat penambahan lampiran



IV pembahasan TAPD dan menunggu hasil akhir rekonsiliasi dr BPKAD terkait OPS KDH/WKDH 2025.

15. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dalam rancangan awal RKPD setelah dilakukan analisis kebutuhan untuk pagu anggaran yang ada pada rancangan awal RKPD tidak mencukupi karena adanya penambahan untuk pembayaran Belanja Jasa Kantor (THL) dan BPJS, Makan Minum Jamuan Tamu, Belanja Modal yang meliputi: Ajudan, Pramusaji, CS, supir, tenaga listrik, belanja modal, makan minum jamuan tamu, makan minum rapa.
 16. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah dalam rancangan awal RKPD setelah dilakukan analisis kebutuhan untuk pagu anggaran yang ada pada rancangan awal RKPD tidak mencukupi karena adanya penambahan untuk pembayaran Belanja Jasa Kantor (THL) dan BPJS, Belanja logistik kantor dan RT WKDH, Makan Minum Jamuan Tamu dan Rapat yang meliputi: belanja logistik kantor, belanja logistik RT WKDH, Ajudan, Pramusaji, CS, supir, tenaga listrik, makan minum jamuan tamu.
 17. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah dalam rancangan awal RKPD setelah dilakukan analisis kebutuhan untuk pagu anggaran yang ada pada rancangan awal RKPD tidak mencukupi karena adanya penambahan untuk pembayaran Belanja Jasa Kantor (THL) khusus di Rumah Dinas Sekretaris Daerah yang meliputi: Ajudan, Pramusaji, CS, supir, tenaga listrik.
 18. Sub Kegiatan Penyiapan Materi Pimpinan dalam rancangan awal RKPD setelah dilakukan analisis kebutuhan untuk pagu anggaran yang ada pada rancangan awal RKPD tidak mencukupi karena ada dari Sub kegiatan yang bersifat kegiatan pimpinan.
 19. Sub Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara dalam rancangan awal RKPD setelah dilakukan analisis kebutuhan untuk pagu anggaran yang ada pada rancangan awal RKPD tidak mencukupi karena ada dari Sub kegiatan yang bersifat acara.
- b. Pada Program Penataan Organisasi terdapat beberapa Sub Kegiatan yang mengalami perubahan yaitu:



1. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja dalam rancangan awal RKPD setelah dilakukan analisis kebutuhan untuk pagu anggaran yang ada pada rancangan awal RKPD tidak mencukupi karena termasuk Program Prioritas yang harus mencapai target indikator Sasaran Nilai survei indeks berakhlak (poin) (60,90).
2. Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan dalam rancangan awal RKPD setelah dilakukan analisis kebutuhan untuk pagu anggaran yang ada pada rancangan awal RKPD tidak mencukupi karena untuk Membina Penyusunan SOP Disabilitas untuk 5 OPD.
- c. Pada Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah terdapat beberapa Sub Kegiatan yang mengalami perubahan yaitu:
 1. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah dalam rancangan awal RKPD setelah dilakukan analisis kebutuhan untuk pagu anggaran yang ada pada rancangan awal RKPD tidak mencukupi karena pada tahun 2024 sedang dalam tahapan revisi permendagri batas daerah provinsi riau dan sumatera barat dan untuk menginventarisasi titik pilar batas utama yang berada di wilayah perbatasan.
- d. Pada Program Kesejahteraan Rakyat terdapat beberapa Sub Kegiatan yang mengalami perubahan yaitu:
 2. Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual dalam rancangan awal RKPD setelah dilakukan analisis kebutuhan untuk pagu anggaran yang ada pada rancangan awal RKPD dikurangi.
 1. Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual dalam rancangan awal RKPD setelah dilakukan analisis kebutuhan untuk pagu anggaran yang ada pada rancangan awal RKPD dikurangi.
 2. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial dalam rancangan awal RKPD setelah dilakukan analisis kebutuhan untuk pagu anggaran yang ada pada rancangan awal RKPD tidak mencukupi karena ada penambahan Bantuan Sosial Pendidikan.
- e. Pada Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum terdapat beberapa Sub Kegiatan yang mengalami perubahan yaitu:
 1. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan dalam rancangan awal RKPD setelah dilakukan analisis kebutuhan untuk pagu anggaran yang ada pada rancangan awal RKPD tidak mencukupi



karena Dalam rangka percepatan penyelesaian Produk Hukum Daerah di Kementerian Dalam Negeri perlu dilakukan FGD dengan mengundang narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan KL terkait .

2. Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya dalam rancangan awal RKPD setelah dilakukan analisis kebutuhan untuk pagu anggaran yang ada pada rancangan awal RKPD tidak mencukupi karena harus ada Rakor JDIH Se-Provinsi Riau merupakan salah satu penunjang dalam penilaian JDIHN Award yang dilaksanakan setiap tahun oleh Kemenkumham dan diperlukan Konsultasi dan Koordinasi ke Kementrian Dalam Negeri agar hasil pengharmonisasian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota dalam rancangan awal RKPD setelah dilakukan analisis kebutuhan untuk pagu anggaran yang ada pada rancangan awal RKPD tidak mencukupi karena adanya Permohonan konsultasi dari DPRD Kab/Kota dan Perda Kab/Kota yang terus meningkat sebagai perwujudan dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, Banyaknya permohonan Fasilitasi dan Evaluasi Perda dan Perkada Kab/Kota yang disampaikan Kepada Gubernur, Kegiatan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi produk hukum daerah perlu ditingkatkan sebagai bentuk perwujudan dari pembinaan pengawasan Gubernur terhadap Produk Hukum Daerah yang telah difasilitasi dan ditetapkan oleh Kab/Kota.
4. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum dalam rancangan awal RKPD setelah dilakukan analisis kebutuhan untuk pagu anggaran yang ada pada rancangan awal RKPD tidak mencukupi karena adanya perubahan target indikator karena jumlah kasus yang ditangani bertambah untuk masyarakat miskin menjadi 40 kasus dan 25 kasus menjadi 141 kasus untuk masalah hukum bagi pemerintah provinsi.
5. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM dalam rancangan awal RKPD setelah dilakukan analisis kebutuhan untuk pagu anggaran yang ada pada rancangan awal RKPD tidak mencukupi karena Penambahan untuk kepala desa mengikuti paralegal



- justice award yang dilaksanakan oleh Kanwil Hukum dan HAM, Honorer tenaga ahli panitia seleksi Paralegal Justice award.
- f. Pada Program Perekonomian dan Pembangunan terdapat beberapa Sub Kegiatan yang mengalami perubahan yaitu:
1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan dalam rancangan awal RKPD setelah dilakukan analisis kebutuhan untuk pagu anggaran yang ada pada rancangan awal RKPD karena Penambahan belanja jasa tenaga ahli.
 2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup dalam rancangan awal RKPD setelah dilakukan analisis kebutuhan untuk pagu anggaran yang ada pada rancangan awal RKPD karena ada penambahan Penambahan belanja jasa tenaga ahli.
 3. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air dalam rancangan awal RKPD setelah dilakukan analisis kebutuhan untuk pagu anggaran yang ada pada rancangan awal RKPD karena Penambahan belanja jasa tenaga ahli.
 4. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi dalam rancangan awal RKPD setelah dilakukan analisis kebutuhan untuk pagu anggaran yang ada pada rancangan awal RKPD tidak mencukupi karena adanya penambahan Belanja Jasa Tenaga Ahli, Makan Minum Rapat internal Kantor, Belanja Sewa Hotel, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Perjalanan Dinas.
- g. Pada Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa terdapat beberapa Sub Kegiatan yang mengalami perubahan yaitu:
1. Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa dalam rancangan awal RKPD setelah dilakukan analisis kebutuhan untuk pagu anggaran yang ada pada rancangan awal RKPD tidak mencukupi karena adanya Penguatan penggunaan e-katalog Lokal dan P3DN.
 2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dalam rancangan awal RKPD setelah dilakukan analisis kebutuhan untuk



- pagu anggaran yang ada pada rancangan awal RKPD dikurangi karena Pelaksanaan Tender/Paket menggunakan E-Katalog.
3. Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa dalam rancangan awal RKPD setelah dilakukan analisis kebutuhan untuk pagu anggaran yang ada pada rancangan awal RKPD dikurangi karena Pelaksanaan Tender/Paket menggunakan E-Katalog.
 4. Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik dalam rancangan awal RKPD setelah dilakukan analisis kebutuhan untuk pagu anggaran yang ada pada rancangan awal RKPD karena ada pemindahan dari Sub Kegiatan lain.
 5. Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa dalam rancangan awal RKPD setelah dilakukan analisis kebutuhan untuk pagu anggaran yang ada pada rancangan awal RKPD karena ada pemindahan dari Sub Kegiatan lain
 6. Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa dalam rancangan awal RKPD setelah dilakukan analisis kebutuhan untuk pagu anggaran yang ada pada rancangan awal RKPD karena ada pemindahan dari Sub Kegiatan lain.
 7. Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa dalam rancangan awal RKPD setelah dilakukan analisis kebutuhan untuk pagu anggaran yang ada pada rancangan awal RKPD karena ada pemindahan dari Sub Kegiatan lain.
 8. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa dalam rancangan awal RKPD setelah dilakukan analisis kebutuhan untuk pagu anggaran yang ada pada rancangan awal RKPD karena ada pemindahan dari Sub Kegiatan lain.
 9. Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa dalam rancangan awal RKPD setelah dilakukan analisis kebutuhan untuk pagu anggaran yang ada pada rancangan awal RKPD karena ada pemindahan dari Sub Kegiatan lain.
 - h. Pada Program Kebijakan Administrasi Pembangunan terdapat beberapa Sub Kegiatan yang mengalami perubahan yaitu:
 1. Sub Kegiatan Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah dalam rancangan awal RKPD setelah dilakukan analisis kebutuhan untuk pagu anggaran yang ada pada rancangan awal RKPD tidak



- mencukupi untuk Penambahan Pagu untuk mengakomodir pengendalian pelaksanaan kegiatan penanggulangan P3KE dan kemiskinan ekstreme di Provinsi Riau.
2. Sub Kegiatan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah dalam rancangan awal RKPD setelah dilakukan analisis kebutuhan untuk pagu anggaran yang ada pada rancangan awal RKPD tidak mencukupi untuk Penambahan Pagu tersebut untuk mengakomodir pelaksanaan perumahan Pemukiman air Bersih dan Sanitasi (PPAS) / PKP di Provinsi Riau.
- i. Pada Program Pengelolaan Perbatasan terdapat beberapa Sub Kegiatan yang mengalami perubahan yaitu:
1. Sub Kegiatan Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara dalam rancangan awal RKPD setelah dilakukan analisis kebutuhan untuk pagu anggaran yang ada pada rancangan awal RKPD dikurangi karena 'Pindahkan Belanja Modal pembangunan Tugu Pilar Batas Provinsi Riau Sumbar Segmen Rorul- tidak sesuai dengan indikator sub kegiatan pada sub kegiatan penataan Wilayah Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), partisipasi berarti berperan serta (disuatu kegiatan), ikut serta seluruh masyarakat harus menyukseskan pembangunan bangsa dan negara. Pengertian otonomi daerah, menurut Undang-Undang no. 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 5, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Partisipasi dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat diartikan sebagai kegiatan atau peran serta warga negara demi suksesnya pelaksanaan otonomi daerah. Partisipasi warga negara tidak hanya mendukung dan mendorong agar daerah semakin maju dan mandiri tetapi juga membantu Negara atau Pemerintah hanya mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan otonomi daerah.

Sedangkan kebijakan publik adalah kebijakan yang dinyatakan dikeluarkan, dilakukan ataupun yang tidak dilakukan oleh pemerintah yang memuat program dan



RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025

kegiatan atau program yang dijalankan. Kebijakan merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil seseorang atau badan atau lembaga yang pada umumnya memegang kekuasaan untuk mengatasi masalah atau tujuan tertentu terutama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Manfaat partisipasi/usulan masyarakat dalam kebijakan Pemerintah :

- a. Dapat membentuk perilaku atau budaya demokrasi;
- b. Dapat membentuk masyarakat hukum;
- c. Dapat membentuk masyarakat yang bermoral dan berakhlak mulia;
- d. Dapat membentuk masyarakat madani, yaitu masyarakat yang memiliki kesukarelaan, tidak menggantungkan diri pada orang lain (keswasembadaan), tidak menggantungkan diri pada Negara (kemandirian), keterkaitan pada nilai-nilai yang disepakati.

Kebijakan publik harus mendapat dukungan dari rakyat, apabila tidak ada partisipasi warga negara maka tidak ada artinya, hanya berupa tulisan atau dokumen yang tidak bermakna.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
4. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah
5. Pelayanan fungsi fasilitasi kesetaraan gender di kantor- kantor pemerintah serta menyiapkan infrastruktur terhadap kebutuhan semua gender.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya serta bertanggung jawab kepada Gubernur.

Berdasarkan tugas dan fungsi Sekretaris Daerah diatas maka pada Sekretariat Daerah terdapat Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 2.11 dibawah.



Tabel 2.11
Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Provinsi Riau

SKPD: Sekretariat Daerah Provinsi Riau

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Provinsi Riau	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	7 Lembaga	1. Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau Rp. 3,000,000,000
					2. Muhammadiyah Provinsi Riau Rp. 1,500,000,000
					3. Parisada Hindu Provinsi Riau Rp. 238,861,000
					4. BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim) Rp. 250,000,000
					5. MUI (Majelis Ulama Indonesia) Rp. 1,700,000,000
					6. LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an) Rp. 1,800,000,000
					7. BWI (Badan Wakaf Indonesia) Rp. 700,000,000
2	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	2 Dokumen	1. Bidikmisi : 2.009 orang Rp. 39,043,400,000
					2. Prestasi : 3.919 orang Rp. 35,994,962,500
3	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1 Dokumen	1. Bantuan Sosial Pendidikan : 2.098 Proposal Rp. 14,310,234,480



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

3. 1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Pada tahun 2025 tema Pembangunan RKP adalah: ***“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan Berkelanjutan”*** diwujudkan melalui arah kebijakan Prioritas Pembangunan yang meliputi :

- a. Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa
- b. Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah
- c. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Berdasarkan uraian dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Sekretariat Daerah Provinsi Riau sama seperti tahun-tahun sebelumnya akan membantu pemerintah untuk tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Dengan memperhatikan tema Pembangunan Nasional, tema Pembangunan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025 yang tercantum pada RKPD Provinsi Riau Tahun 2025 yaitu: ***“Meningkatkan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola serta Pemerataan Infrastruktur untuk Penguatan Ekonomi Daerah”***, tema tersebut dijabarkan melalui beberapa Fokus dan Prioritas Pembangunan yaitu:

- a. Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM, yang difokuskan kepada:
 1. Pemenuhan Prasarana dasar
 2. Pendidikan



3. Kesehatan
4. Kesetaraan Gender
- b. Peningkatan Tata Kelola, yang difokuskan kepada :
 1. Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital
- c. Pemerataan Infrastruktur yang Berkelanjutan, yang difokuskan kepada :
 1. Pemenuhan Infrastruktur
 2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
- d. Penguatan Ekonomi yang difokuskan kepada :
 1. Pertanian
 2. Hilirisasi SDA
 3. Penguatan Ekonomi masyarakat
 4. Pariwisata Berbudaya Melayu

Berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Riau mempunyai keterkaitan telah sejalan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yaitu membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat Daerah serta pelayanan administratif, dan menyelenggarakan fungsi pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil Negara pada Instansi Daerah, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. Oleh karena hal tersebut telah sejalan, bersinergi dan selaras maka Sekretariat Daerah sebagai OPD yang mempunyai tugas fasilitasi dan koordinasi untuk semua capaian OPD, sasaran, program dan kegiatan yang ada juga telah selaras dengan Prioritas Nasional maupun Provinsi.

3. 2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi serta melaksanakan misi RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025, dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah, rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun peta strategis pembangunan dan sebagai sarana dalam mengevaluasi capaian yang telah dilaksanakan. Perumusan tujuan Renja Sekretariat Daerah ditempuh dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok pada Renstra.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan.



RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025

Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Daerah serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja

Tujuan dan Sasaran dalam Penyusunan Renja Sekretariat Daerah tahun 2025 mengacu pada Renstra Sekretariat Daerah tahun 2025-2026. Berikut keterkaitan antara visi, misi RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025 dengan tujuan dan sasaran, Sekretariat Daerah yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut:

Visi RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025

Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Bathin, di Asia Tenggara Tahun 2025

Adapun berkenaan dengan arti dan maksud Visi Riau 2025 adalah sebagai berikut:

Visi Riau: merupakan kristalisasi komitmen seluruh lapisan masyarakat Riau, Subjek utama yang ingin dicapai dari setiap aktivitas pembangunan di Riau adalah Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Pusat Kebudayaan Melayu dengan bentangan ruang Indonesia, yang mengarahkan secara empirik bahwa pembangunan ekonomi dan kebudayaan Melayu merupakan dua hal yang memiliki hubungan yang krusial. Pembangunan ekonomi yang berbasis keadilan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat diharapkan akan memberi insentif bagi perubahan-perubahan positif pada kebudayaan. Sementara itu, kebudayaan menjadi modal penting pula untuk menggerakkan perkembangan aktivitas ekonomi.

Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian: Potensi perekonomian Riau dan posisi geografis Provinsi Riau yang strategis merupakan modal dasar yang kuat dalam menuju Riau sebagai pusat perekonomian di Kawasan Selat Malaka. Provinsi Riau yang berhadapan langsung dengan beberapa negara tetangga di Asia Tenggara sangat mampu menjadikan Riau sebagai outlet utama bagi aktivitas perdagangan antar negara bagi Kawasan Selat Malaka. Posisi Riau yang berada di tengah pulau Sumatera menjadi sangat penting sebagai lintasan pergerakan antar wilayah di Pulau Sumatera, sehingga memberikan peluang untuk membangun akses yang tinggi bagi lalu lintas barang, orang, informasi dan modal; keuntungan lokasi sebagai pusat kegiatan; dan sebagai lokasi transit pergerakan orang dan barang.

Provinsi Riau sebagai Pusat Kebudayaan Melayu: Merupakan sumber penggalian, penerapan, dan orientasi bagi nilai-nilai Budaya Melayu, dimana Budaya Melayu menjadi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2026 ruh bagi prilaku masyarakat dan pemerintahan dalam karsa dan karya pembangunan di



RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025

Provinsi Riau. Sebagai sebuah payung kebudayaan daerah, yakni kelangsungan Budaya Melayu secara komunitas dalam kerangka pemberdayaannya sebagai alat pemersatu dari berbagai etnis yang ada. Riau sebagai tanah leluhur Budaya Melayu semakin perlu menegaskan jati diri Melayu di Kawasan Selat Malaka.

Masyarakat yang Agamis dan Sejahtera: Tujuan akhir pembangunan adalah masyarakat yang beriman dan bertakwa, di samping kesejahteraan secara fisik. Dalam aspek sosial dan budaya ditunjukkan dengan kestabilan politik, ketentraman dan ketertiban, pengamalan agama secara konsisten, kerukunan hidup antar umat beragama, kelestarian dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya daerah.

Misi RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025

Sebagai upaya untuk merealisasikan Visi Pembangunan Provinsi Riau hingga tahun 2025 melalui tahapan pencapaian target yang lebih fokus dan terarah, maka ditetapkan Misi Pembangunan Provinsi Riau sebagai berikut :

1. Mewujudkan Provinsi Riau sebagai pusat kegiatan perekonomian adalah mendorong dan membangun kegiatan dan prasarana ekonomi serta menciptakan pusat-pusat lintasan darat, laut dan udara bagi Pulau Sumatera, Indonesia, dan Kawasan Selat Malaka.
2. Mewujudkan perekonomian yang berkelanjutan dan berdaya saing adalah meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dan pendapatan daerah berbasis pada potensi sumberdaya daerah terbarukan melalui pengembangan sektor ekonomi unggulan diluar minyak dan gas serta ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan masyarakat.
3. Mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah adalah mempersempit disparitas pembangunan antar wilayah melalui pendistribusian pembangunan pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, mengintegrasikan infrastruktur transportasi antar moda, mendistribusikan pembangunan prasarana wilayah lainnya, dan pembangunan sumberdaya manusia yang seimbang antar wilayah di Provinsi Riau.
4. Mewujudkan kerjasama pembangunan antar wilayah adalah membangun dan memperkuat koordinasi dan kerjasama pembangunan antar kabupaten/kota dalam Provinsi, antar Provinsi, dan antar Negara dalam bidang infrastruktur, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.



RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025

5. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi Pemerintah daerah adalah membangun dan memperkuat tata kelola pemerintah dan pembentukan aparatur yang berkemampuan tinggi, professional, bersih dan beribawa.
6. Mewujudkan dukungan sistem informasi pembangunan yang handal adalah membangun sistem informasi pembangunan, pendapatan dan informasi yang lengkap, akurat dan dapat diakses oleh seluruh pihak melalui pemanfaatan teknologi maju guna mendukung pembangunan.
7. Mewujudkan masyarakat Riau yang mandiri dan sejahtera adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan sumberdaya manusia Riau melalui pendidikan, pelayanan kesehatan, pembinaan etika, moral dan budaya serta meningkatkan kehidupan sosial-ekonomi melalui pemberdayaan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan.
8. Mewujudkan kebudayaan Melayu sebagai payung kebudayaan adalah penyediaan sarana dan prasarana pusat referensi dan pusat promosi kebudayaan melayu dan membina serta memberdayakan Budaya Melayu sebagai alat pemersatu tanpa menghilangkan jati diri dalam rangka mewujudkan masyarakat Riau yang maju, mandiri, dan berdayasaing.
9. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berakhlak adalah meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai moral dan agama dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat yang toleran, rukun, dan damai.
10. Mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat adalah membangun kondisi yang kondusif bagi kehidupan dan kegiatan perekonomian, sosial, politik, dan kebudayaan bagi seluruh masyarakat di Provinsi Riau.
11. Mewujudkan lingkungan yang lestari adalah mengendalikan dan memulihkan kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan guna mendukung pembangunan Provinsi Riau yang berkelanjutan.
12. Mewujudkan masyarakat madani adalah mempercepat penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia, dan kehidupan masyarakat yang demokratis.

Dari Visi dan Misi RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025 diatas maka Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1.
TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DATA CAPAIAN AWAL PERENCANAAN	TARGET		CAPAIAN AKHIR
						2025	2026	
1.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	67.63 Point	72.02 Point	74.04 Point	74.04 Point
		Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan daerah	Indeks kepuasan layanan adminsitrasi umum dilingkungan Sekretariat Daerah	Nilai	Baik (76.61) Nilai	Baik (77.00) Nilai	Baik (80.00) Nilai	Baik (80.00) Nilai
		Meningkatnya kualitas layanan pimpinan	Indek Kepuasan Layanan	Nilai	Baik (76.61) Nilai	Baik (77.00) Nilai	Baik (80.00) Nilai	Baik (80.00) Nilai
		Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan organisasi	Indeks Kelembagaan	Point	72.62 Point	75 Point	81 Point	81 Point
			Nilai Sakip	Nilai	70.51 Point	73.03 Point	74 Point	74 Point
		Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Nilai EPPD	Nilai	3.47 Nilai	3.47 Nilai	3.50 Nilai	3.50 Nilai
			Persentase SPM	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
		Meningkatnya efektivitas pengelolaan hukum daerah	Persentase penyelesaian perda sesuai program legilasi daerah	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
			Persentase peraturan perundang udangan yang tidak harmonis yang direvisi/dihapus	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2.	Meningkatkan Kesejahteraan rakyat dan Kerukunan Umat Beragama		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Point	3 Point	3 Point	4 Point	4 Point
		Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan	Persentase Capaian pelaksanaan pembangunan (APBD, APBN, Wilayah dan Mandatori)	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
3.	Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing		Nilai KUB	Indeks	74.32 Indeks	77.11 Indeks	77.6 Indeks	77.6 Indeks
			Tingkat Kemiskinan	Persen	6.78 Persen	6.05-5.45 Persen	5.89-5.30 Persen	5.89-5.30 Persen
		Meningkatnya kualitas kebijakan bidang perekonomian	Indeks PMK	Nilai	63.29 (sedang) Nilai	63.29 (sedang) Nilal	63.70 (sedang) Nilai	63.70 (sedang) Nilai
			Persentase Bahan Kebijakan Umum Pembinaan, Pemahaman, Pengamalan Keagamaan	Persen	91 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
			Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4.55 Persen	3.45-3.67 Persen	3.53-3.79 Persen	3.53-3.79 Persen
			Tingkat Inflasi	Persen	6.81 Persen	2.22 Persen	1.97 Persen	1.97 Persen
			PDB sektor strategis (pertanian, migas, industri) perkapita	Angka	715.036.378 Juta Rupiah	715.036.378 Juta Rupiah	743.119.041 Juta Rupiah	743.119.041 Juta Rupiah



3. 3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Di dalam proses rencana kerja, Sekretariat Daerah Provinsi Riau mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Provinsi Riau untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolok ukur (benchmarks) bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Mengacu pada tema pembangunan Provinsi Riau, faktor-faktor yang menjadi bahan rumusan pada rencana kerja tahun 2025 pada Sekretariat Daerah Provinsi Riau berkaitan dengan pencapaian prioritas pembangunan Provinsi Riau tahun 2025 yaitu: ***“Meningkatkan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola serta Pemerataan Infrastruktur untuk Penguatan Ekonomi Daerah”***.

Dalam mencapai sasaran strategis ini dana yang dibutuhkan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Riau untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp. 371.225.780.715,00 (Tiga ratus tujuh puluh satu milyar dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima belas rupiah) yang terbagi dalam 9 Program, 32 Kegiatan dan 91 Sub Kegiatan.

Adapun Program Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 terdiri dari:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (12 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan)
- b. Program Penataan Organisasi (2 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan)
- c. Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah (3 Kegiatan dan 9 Sub Kegiatan)
- d. Program Kesejahteraan Rakyat (3 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan)
- e. Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum (2 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan)
- f. Program Perekonomian Dan Pembangunan (3 Kegiatan dan 10 Sub Kegiatan)
- g. Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa (3 Kegiatan dan 9 Sub Kegiatan)
- h. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan (2 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan)
- i. Program Pengelolaan Perbatasan (2 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan)



**RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2025**

Secara terinci rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau pada tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.2. berikut ini:

Tabel 3.2.
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
PROVINSI RIAU

Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perkiraan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4					SEKRETARIAT DAERAH				371.225.780.715				363.482.555.465
					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				370.790.851.232				362.814.555.465
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				370.790.851.232	Pendapat Asli Daerah (PAD)			362.814.555.465
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat Daerah		100 Persen	202.186.619.964	Pendapat Asli Daerah (PAD)			184.869.072.681
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen	644.800.000	Pendapat Asli Daerah (PAD)			300.000.000
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	644.800.000	Pendapat Asli Daerah (PAD)		5 Dokumen	300.000.000
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi		1 Laporan	74.758.076.829	Pendapat Asli Daerah (PAD)			78.512.955.746
4	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	545 Orang/ Bulan	74.758.076.829	Pendapat Asli Daerah (PAD)		545 Orang/ Bulan	78.512.955.746
4	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola		1 Laporan	426.500.000	Pendapat Asli Daerah (PAD)			426.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perkiraan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	4 Laporan	426.500.000	Pendapat Asli Daerah (PAD)		4 Laporan	426.500.000
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi		2 Jenis	355.000.000	Pendapat Asli Daerah (PAD)			366.950.000
4	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	2 Paket	115.000.000	Pendapat Asli Daerah (PAD)		2 Paket	116.950.000
4	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	240.000.000	Pendapat Asli Daerah (PAD)		2 Dokumen	250.000.000
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi		5 Jenis	14.566.612.116	Pendapat Asli Daerah (PAD)			11.450.000.000
4	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	1 Paket	599.997.636	Pendapat Asli Daerah (PAD)		1 Paket	650.000.000
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	12 Paket	3.146.708.109	Pendapat Asli Daerah (PAD)		12 Paket	1.800.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perkiraan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	4 Paket	1.098.381.470	Pendapat Asli Daerah (PAD)		4 Paket	950.000.000
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3500 Laporan	7.688.675.000	Pendapat Asli Daerah (PAD)		3500 Laporan	6.000.000.000
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		2 Jenis	16.402.280.000	Pendapat Asli Daerah (PAD)			4.000.000.000
4	01	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	2 Unit	322.100.000	Pendapat Asli Daerah (PAD)		2 Unit	2.000.000.000
4	01	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	2 Unit	16.080.180.000	Pendapat Asli Daerah (PAD)		2 Unit	2.000.000.000
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi		3 jenis	32.180.170.522	Pendapat Asli Daerah (PAD)			28.530.012.608
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	100.000.000	Pendapat Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	100.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perkiraan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	12 Laporan	11.999.999.994	Pendapat Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	8.700.000.000
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	12 Laporan	20.080.170.528	Pendapat Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	19.730.012.608
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		4 Jenis	16.020.812.780	Pendapat Asli Daerah (PAD)			11.850.000.000
4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	21 Unit	1.197.440.000	Pendapat Asli Daerah (PAD)		21 Unit	1.000.000.000
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	130 Unit	5.561.260.000	Pendapat Asli Daerah (PAD)		130 Unit	3.350.000.000
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	582 Unit	2.778.443.780	Pendapat Asli Daerah (PAD)		582 Unit	2.100.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perkiraan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	46 Unit	6.483.669.000	Pendapat Asli Daerah (PAD)		46 Unit	5.400.000.000
4	01	01	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah yang difasilitasi administrasi Keuangan dan Operasionalnya		2 Orang	9.150.154.327	Pendapat Asli Daerah (PAD)			17.352.654.327
4	01	01	1.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	2 Orang/Bulan	271.154.327	Pendapat Asli Daerah (PAD)		2 Orang/Bulan	271.154.327
4	01	01	1.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	2 Paket	460.000.000	Pendapat Asli Daerah (PAD)		2 Paket	460.000.000
4	01	01	1.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	4 Orang	48.000.000	Pendapat Asli Daerah (PAD)		4 Orang	48.000.000
4	01	01	1.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	2 Orang/Bulan	8.371.000.000	Pendapat Asli Daerah (PAD)		2 Orang/Bulan	16.573.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perkiraan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	01	1.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah jenis Layanan kebutuhan Rumah tangga Sekrtariat Daerah yang di fasilitasi		3 Jenis	15.118.325.116	Pendapat Asli Daerah (PAD)			9.050.000.000
4	01	01	1.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	5 Paket	7.148.850.658	Pendapat Asli Daerah (PAD)		5 Paket	4.600.000.000
4	01	01	1.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	5 Paket	6.425.852.458	Pendapat Asli Daerah (PAD)		5 Paket	3.700.000.000
4	01	01	1.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	4 Paket	1.543.622.000	Pendapat Asli Daerah (PAD)		4 Paket	750.000.000
4	01	01	1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah jenis layanan Materi dan Komunikasi Pimpinan yang difasilitasi		3 Jenis	5.871.999.975	Pendapat Asli Daerah (PAD)			5.680.000.000
4	01	01	1.13	0001	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120 Dokumen	621.999.975	Pendapat Asli Daerah (PAD)		120 Dokumen	280.000.000
4	01	01	1.13	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	450.000.000	Pendapat Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	500.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perkiraan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	01	1.13	0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	4.800.000.000	Pendapat Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	4.900.000.000
4	01	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan	Frekuensi keprotokolan yang difasilitasi		360 Kali	16.691.888.299	Pendapat Asli Daerah (PAD)			17.350.000.000
4	01	01	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	240 Laporan	9.291.891.169	Pendapat Asli Daerah (PAD)		240 Laporan	7.700.000.000
4	01	01	1.14	0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120 Laporan	5.399.998.540	Pendapat Asli Daerah (PAD)		120 Laporan	8.500.000.000
4	01	01	1.14	0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	360 Laporan	1.999.998.590	Pendapat Asli Daerah (PAD)		360 Laporan	1.150.000.000
4	01	02			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai nilai RB Baik		100 Persen	2.053.117.012	Pendapat Asli Daerah (PAD)			2.356.220.982
4	01	02	1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase perangkat daerah yang sudah sesuai dengan kelembagaannya		100 Persen	588.193.383	Pendapat Asli Daerah (PAD)			705.832.799
4	01	02	1.01	0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33 Dokumen	179.342.117	Pendapat Asli Daerah (PAD)		33 Dokumen	215.210.769

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perkiraan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	02	1.01	0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	182.333.201	Pendapat Asli Daerah (PAD)		12 Dokumen	218.799.949
4	01	02	1.01	0003	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33 Dokumen	226.518.065	Pendapat Asli Daerah (PAD)		33 Dokumen	271.822.081
4	01	02	1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase terfasilitasinya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		100 Persen	1.464.923.629	Pendapat Asli Daerah (PAD)			1.650.388.183
4	01	02	1.02	0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	411.999.290	Pendapat Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	494.399.477
4	01	02	1.02	0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	429.965.468	Pendapat Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	515.958.598
4	01	02	1.02	0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	186.838.854	Pendapat Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	129.170.338

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perkiraan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	02	1.02	0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	194.454.817	Pendapat Asli Daerah (PAD)		3 Dokumen	220.861.157
4	01	02	1.02	0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	241.665.200	Pendapat Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	289.998.613
4	01	03			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Terfasilitasinya Penataan Pemerintahan dan		100 Persen	5.014.032.665	Pendapat Asli Daerah (PAD)			4.381.004.520
4	01	03	1.01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Tugas Pemerintahan		100 Persen	2.252.429.338	Pendapat Asli Daerah (PAD)			1.619.400.000
4	01	03	1.01	0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	809.599.434	Pendapat Asli Daerah (PAD)		2 Dokumen	809.600.000
4	01	03	1.01	0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	459.799.964	Pendapat Asli Daerah (PAD)		2 Dokumen	459.800.000
4	01	03	1.01	0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	983.029.940	Pendapat Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	350.000.000
4	01	03	1.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Terlaksananya Otonomi Daerah		100 Persen	1.904.703.914	Pendapat Asli Daerah (PAD)			1.904.704.520

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perkiraan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	03	1.02	0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	387.364.288	Pendapat Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	387.364.520
4	01	03	1.02	0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	413.819.745	Pendapat Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	413.820.000
4	01	03	1.02	0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	1.103.519.881	Pendapat Asli Daerah (PAD)		3 Laporan	1.103.520.000
4	01	03	1.03		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Terfasilitasinya Kerjasama Daerah		100 Persen	856.899.413	Pendapat Asli Daerah (PAD)			856.900.000
4	01	03	1.03	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	505.780.000	Pendapat Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	505.780.000
4	01	03	1.03	0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	183.919.734	Pendapat Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	183.920.000
4	01	03	1.03	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	167.199.679	Pendapat Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	167.200.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perkiraan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	04			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Dan Bina Mental Spiritual Yang Dikendalikan		100 Persen	150.258.855.559	Pendapat Asli Daerah (PAD)			160.692.000.000
4	01	04	1.01		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Terfasilitasinya Pembinaan Mental Spiritual		100 Persen	34.456.695.010	Pendapat Asli Daerah (PAD)			46.000.000.000
4	01	04	1.01	0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	13.796.194.010	Pendapat Asli Daerah (PAD)		1 Unit	25.000.000.000
4	01	04	1.01	0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Lembaga	20.660.501.000	Pendapat Asli Daerah (PAD)		8 Lembaga	21.000.000.000
4	01	04	1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase Terfasilitasinya Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		100 Persen	114.782.160.549	Pendapat Asli Daerah (PAD)			113.637.000.000
4	01	04	1.02	0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	98.499.960.594	Pendapat Asli Daerah (PAD)		2 Dokumen	100.500.000.000
4	01	04	1.02	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	299.999.999	Pendapat Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	330.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perkiraan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	04	1.02	0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	15.982.199.956	Pendapat Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	12.807.000.000
4	01	04	1.03		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase Terfasilitasinya Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar		100 Persen	1.020.000.000	Pendapat Asli Daerah (PAD)			1.055.000.000
4	01	04	1.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	362.326.600	Pendapat Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	375.000.000
4	01	04	1.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	375.000.000	Pendapat Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	380.000.000
4	01	04	1.03	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	282.673.400	Pendapat Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	300.000.000
4	01	05			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum Yang Dilaksanakan		100 Persen	3.041.346.531	Pendapat Asli Daerah (PAD)			2.380.678.567

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perkiraan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	05	1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase terfasilitasinya Penyusunan Perundang-Undangan		100 Persen	1.158.170.011	Pendapat Asli Daerah (PAD)			1.156.188.971
4	01	05	1.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Dokumen	422.570.437	Pendapat Asli Daerah (PAD)		100 Dokumen	423.084.694
4	01	05	1.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450 Dokumen	153.145.733	Pendapat Asli Daerah (PAD)		450 Dokumen	183.775.193
4	01	05	1.01	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Dokumen	231.540.526	Pendapat Asli Daerah (PAD)		100 Dokumen	190.632.742
4	01	05	1.01	0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120 Dokumen	350.913.315	Pendapat Asli Daerah (PAD)		120 Dokumen	358.696.342
4	01	05	1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase terfasilitasinya Bantuan Hukum		100 Persen	1.883.176.520	Pendapat Asli Daerah (PAD)			1.224.489.596
4	01	05	1.02	0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Kasus	1.266.888.453	Pendapat Asli Daerah (PAD)		25 Kasus	666.312.971
4	01	05	1.02	0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	Semua Kota/Kab,	20 Kasus	616.288.067	Pendapat Asli Daerah (PAD)		20 Kasus	558.176.625

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perkiraan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	06			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Terkelolanya Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian		100 Persen	2.956.572.138	Pendapat Asli Daerah (PAD)			2.925.000.000
4	01	06	1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Terkelolanya Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian		100 Persen	899.999.902	Pendapat Asli Daerah (PAD)			1.000.000.000
4	01	06	1.01	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	599.999.964	Pendapat Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	650.000.000
4	01	06	1.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	299.999.938	Pendapat Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	350.000.000
4	01	06	1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Terkelolanya Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam		100 Persen	800.000.000	Pendapat Asli Daerah (PAD)			625.000.000
4	01	06	1.02	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	216.470.000	Pendapat Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	175.000.000
4	01	06	1.02	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	200.000.000	Pendapat Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	150.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perkiraan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	06	1.02	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	383.530.000	Pendapat Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	300.000.000
4	01	06	1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Terkelolanya Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD		83,33 Persen	1.256.572.236	Pendapat Asli Daerah (PAD)			1.300.000.000
4	01	06	1.03	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	600.000.000	Pendapat Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	700.000.000
4	01	06	1.03	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	326.572.236	Pendapat Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	150.000.000
4	01	06	1.03	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000	Pendapat Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	150.000.000
4	01	06	1.03	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	150.000.000	Pendapat Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	200.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perkiraan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	06	1.03	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	80.000.000	Pendapat Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	100.000.000
4	01	07			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah		100 Persen	2.126.260.993	Pendapat Asli Daerah (PAD)			2.150.000.000
4	01	07	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase terkelolanya pengadaan barang dan jasa		100 Persen	599.960.319	Pendapat Asli Daerah (PAD)			600.000.000
4	01	07	1.01	0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	149.982.400	Pendapat Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	150.000.000
4	01	07	1.01	0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	299.999.974	Pendapat Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	300.000.000
4	01	07	1.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	149.977.945	Pendapat Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	150.000.000
4	01	07	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik		100 Persen	826.300.674	Pendapat Asli Daerah (PAD)			850.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perkiraan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	07	1.02	0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	600.000.000	Pendapat Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	600.000.000
4	01	07	1.02	0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	106.300.674	Pendapat Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	150.000.000
4	01	07	1.02	0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	120.000.000	Pendapat Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	100.000.000
4	01	07	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Terbinanya dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		100 Persen	700.000.000	Pendapat Asli Daerah (PAD)			700.000.000
4	01	07	1.03	0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150 Orang	200.000.000	Pendapat Asli Daerah (PAD)		150 Orang	200.000.000
4	01	07	1.03	0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	350.000.000	Pendapat Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	350.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perkiraan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	07	1.03	0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	150.000.000	Pendapat Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	150.000.000
4	01	08			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Rumusan Kebijakan Pembangunan Daerah Yang Dikendalikan		100 Persen	3.154.046.370	Pendapat Asli Daerah (PAD)			3.060.578.715
4	01	08	1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Evaluasi Pembangunan		100 Persen	920.578.136	Pendapat Asli Daerah (PAD)			1.060.578.715
4	01	08	1.01	0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	373.242.462	Pendapat Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	453.242.540
4	01	08	1.01	0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	203.245.609	Pendapat Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	253.245.770
4	01	08	1.01	0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	344.090.065	Pendapat Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	354.090.405
4	01	08	1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		100 Persen	2.233.468.234	Pendapat Asli Daerah (PAD)			2.000.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perkiraan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	08	1.02	0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	295.927.480	Pendapat Asli Daerah (PAD)		2 Dokumen	250.000.000
4	01	08	1.02	0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	459.999.921	Pendapat Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	500.000.000
4	01	08	1.02	0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.477.540.833	Pendapat Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	1.250.000.000
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				434.929.483	Pendapat Asli Daerah (PAD)			668.000.000
5	06				PENGELOLAAN PERBATASAN				434.929.483	Pendapat Asli Daerah (PAD)			668.000.000
5	06	02			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase Terkelolanya Wilayah Perbatasan		50 Persen	434.929.483	Pendapat Asli Daerah (PAD)			668.000.000
5	06	02	1.01		Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama		100 Persen	169.995.715	Pendapat Asli Daerah (PAD)			170.000.000
5	06	02	1.01	0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	169.995.715	Pendapat Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	170.000.000
5	06	02	1.02		Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Persentase terselesaikannya kewilayah di Lokasi Prioritas (Lokpri)		100 Persen	264.933.768	Pendapat Asli Daerah (PAD)			498.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perkiraan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	06	02	1.02	0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	129.983.678	Pendapat Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	130.000.000
5	06	02	1.02	0003	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	134.950.090	Pendapat Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	368.000.000



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 telah disusun berdasarkan usulan yang disampaikan oleh masing-masing Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau, dan telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025. Secara terinci Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Riau pada Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SEKRETARIAT DAERAH						371.225.780.715,00							363.482.555.465,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						370.790.851.232,00							362.814.555.465,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						370.790.851.232,00							362.814.555.465,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat Daerah	100 Persen			100 Persen	202.186.619.964,00						100 Persen	184.869.072.681,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen			1 Dokumen	644.800.000,00			-	Peningkata n Tata Kelola	-	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen			5 Dokumen	644.800.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	5 Dokumen	300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi	2 Laporan 1 LAPORAN 2 Laporan			1 LAPORAN	74.758.076.829,00			-	Peningkata n Tata Kelola	-	1 Laporan 1 LAPORAN 1 Laporan	78.512.955.746,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1090 Orang/ Bulan			545 Orang/ Bulan	74.758.076.829,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola	-	545 Orang/ Bulan	78.512.955.746,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola	2 laporan 2 Laporan 2 Laporan			1 Laporan	426.500.000,00			-	Peningkata n Tata Kelola	-	1 laporan 1 Laporan 1 Laporan	426.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan			4 Laporan	426.500.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	4 Laporan	426.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi	2 Jenis 2 Jenis 4 Jenis			2 Jenis	355.000.000,00			-	Peningkata n Tata Kelola	-	2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis	366.950.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>	4 Paket			2 Paket	115.000.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	2 Paket	116.950.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	4 Dokumen			2 Dokumen	240.000.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	2 Dokumen	250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi</i>	10 Jenis 10 Jenis 5 jenis			5 Jenis	14.566.612.116,00			-	Peningkata n Tata Kelola	-	5 Jenis 5 Jenis 5 jenis	11.450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket			2 Paket	599.997.636,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	1 Paket	650.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	40 Paket			50 Paket	2.032.849.901,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	20 Paket	2.050.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	24 Paket			12 Paket	3.146.708.109,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	12 Paket	1.800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	8 Paket			4 Paket	1.098.381.470,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	4 Paket	950.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	8000 Laporan			3500 Laporan	7.688.675.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	4500 Laporan	6.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</i>	4 Jenis 2 jenis 2 Jenis			2 Jenis	16.402.280.000,00			-	Peningkata n Tata Kelola	-	2 Jenis 2 jenis 2 Jenis	4.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>	4 Unit			1 Unit	322.100.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	2 Unit	2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	4 Unit			20 Unit	16.080.180.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	2 Unit	2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</i>	3 Jenis 6 Jenis 3 jenis			3 jenis	32.180.170.522,00			-	Peningkata n Tata Kelola	-	3 Jenis 3 Jenis 3 jenis	28.530.012.608,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	24 Laporan			12 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	12 Laporan	100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	24 Laporan			12 Laporan	11.999.999.994,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	12 Laporan	8.700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	24 Laporan			12 Laporan	20.080.170.528,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	12 Laporan	19.730.012.608,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</i>	8 Jenis 4 Jenis 4 JENIS			4 Jenis	16.020.812.780,00			-	Peningkata n Tata Kelola	-	4 Jenis 4 Jenis 4 JENIS	11.850.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	41 Unit			21 Unit	1.197.440.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	20 Unit	1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	271 Unit			141 Unit	5.561.260.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	141 Unit	3.350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	1164 Unit			582 Unit	2.778.443.780,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	582 Unit	2.100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	92 Unit			46 Unit	6.483.669.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	46 Unit	5.400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	<i>Jumlah Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah yang difasilitasi administrasi Keuangan dan Operasionalnya</i>	4 Orang 2 ORANG 4 Orang			2 Orang	9.150.154.327,00			-	Peningkata n Tata Kelola	-	2 Orang 2 ORANG 2 Orang	17.352.654.327,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	4 Orang/Bulan			2 Orang/Bulan	271.154.327,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	2 Orang/Bulan	271.154.327,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i>	4 Paket			2 Paket	460.000.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	2 Paket	460.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	8 Orang			4 Orang	48.000.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	4 Orang	48.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	4 Orang/ Bulan			2 Orang/ Bulan	8.371.000.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	2 Orang/ Bulan	16.573.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	<i>Jumlah jenis Layanan kebutuhan Rumah tangga Sekrtariat Daerah yang di fasilitasi</i>	6 Jenis 3 Jenis 3 JENIS			3 Jenis	15.118.325.116,00			-	Peningkata n Tata Kelola	-	3 Jenis 3 Jenis 3 JENIS	9.050.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan</i>	10 Paket			5 Paket	7.148.850.658,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	5 Paket	4.600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	10 Paket			5 Paket	6.425.852.458,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	5 Paket	3.700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	8 Paket			4 Paket	1.543.622.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	4 Paket	750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah jenis layanan Materi dan Komunikasi Pimpinan yang difasilitasi	3 jenis 3 Jenis 6 Jenis			3 Jenis	5.871.999.975,00			-	Peningkata n Tata Kelola	-	3 jenis 3 Jenis 3 Jenis	5.680.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan														
			Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	240 Dokumen			120 Dokumen	621.999.975,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	120 Dokumen	280.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	24 Laporan			12 Laporan	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	12 Laporan	500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	24 Laporan			12 Laporan	4.800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	12 Laporan	4.900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Frekuensi keprotokolan yang difasilitasi	720 Kali 720 Kali 720 Kali			360 Kali	16.691.888.299,00			-	Peningkata n Tata Kelola	-	360 Kali 360 Kali 360 Kali	17.350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	480 Laporan			240 Laporan	9.291.891.169,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	240 Laporan	7.700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	240 Laporan			120 Laporan	5.399.998.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	120 Laporan	8.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan</i>	720 Laporan			360 Laporan	1.999.998.590,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	360 Laporan	1.150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	<i>Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai nilai RB Baik</i>	100 Persen			100 Persen	2.053.117.012,00						100 Persen	2.356.220.982,00	
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	<i>Persentase perangkat daerah yang sudah sesuai dengan kelembagaannya</i>	100 Persen			100 Persen	588.193.383,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	-	100 Persen	705.832.799,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota</i>	39 Dokumen			33 Dokumen	179.342.117,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	-	6 Dokumen	215.210.769,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota</i>	24 Dokumen			12 Dokumen	182.333.201,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	-	12 Dokumen	218.799.949,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan</i>	66 Dokumen			33 Dokumen	226.518.065,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	-	33 Dokumen	271.822.081,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	<i>Persentase terfasilitasinya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja</i>	100 Persen			100 Persen	1.464.923.629,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	-	100 Persen	1.650.388.183,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi</i>	4 Dokumen			1 Dokumen	411.999.290,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	-	3 Dokumen	494.399.477,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	3 Dokumen			1 Dokumen	429.965.468,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	-	2 Dokumen	515.958.598,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	2 Laporan			1 Laporan	186.838.854,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	-	1 Laporan	129.170.338,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	6 Dokumen			3 Dokumen	194.454.817,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	-	3 Dokumen	220.861.157,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	2 Dokumen			1 Dokumen	413.819.745,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	1 Dokumen	413.820.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	6 Laporan			3 Laporan	1.103.519.881,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	3 Laporan	1.103.520.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Terfasilitasinya Kerjasama Daerah	100 Persen			100 Persen	856.899.413,00			-	Peningkatan Tata Kelola	-	100 Persen	856.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah														
			Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	2 Dokumen			1 Dokumen	505.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	1 Dokumen	505.780.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta														
			Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	2 Dokumen			1 Dokumen	183.919.734,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	1 Dokumen	183.920.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama														
			Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	2 Laporan			1 Laporan	167.199.679,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	1 Laporan	167.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Dan Bina Mental Spiritual Yang Dikendalikan	100 Persen			100 Persen	150.258.855.559,00						100 Persen	160.692.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Terfasilitasinya Pembinaan Mental Spiritual	100 Persen			100 Persen	34.456.695.010,00			Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkata n Tata Kelola	-	100 Persen	46.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	2 Unit			4 Unit	13.796.194.010,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkata n Tata Kelola	-	1 Unit	25.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	16 Lembaga			7 Lembaga	20.660.501.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Tata Kelola	-	8 Lembaga	21.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase Terfasilitasinya Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	100 Persen			100 Persen	114.782.160.549,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenakawanan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	-	100 Persen	113.637.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	4 Dokumen			2 Dokumen	98.499.960.594,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	-	2 Dokumen	100.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	2 Dokumen			1 Dokumen	299.999.999,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	-	1 Dokumen	330.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	2 Dokumen			1 Dokumen	362.326.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	-	1 Dokumen	375.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	2 Dokumen			1 Dokumen	375.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	-	1 Dokumen	380.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	2 Dokumen			1 Dokumen	282.673.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	-	1 Dokumen	300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
5.	4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum Yang Dilaksanakan	100 Persen			100 Persen	3.041.346.531,00						100 Persen	2.380.678.567,00	
	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase terfasilitasinya Penyusunan Perundang-Undangan	100 Persen 100 Persen			100 Persen	1.158.170.011,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	-	100 Persen 100 Persen	1.156.188.971,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun</i>	220 Dokumen			100 Dokumen	422.570.437,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	-	120 Dokumen	423.084.694,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan														
			<i>Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun</i>	950 Dokumen			450 Dokumen	153.145.733,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	-	500 Dokumen	183.775.193,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya														
			<i>Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya</i>	250 Dokumen			100 Dokumen	231.540.526,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	-	150 Dokumen	190.632.742,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi</i>	320 Dokumen			120 Dokumen	350.913.315,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	-	200 Dokumen	358.696.342,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	<i>Persentase terfasilitasinya Bantuan Hukum</i>	100 Persen 100 Persen			100 Persen	1.883.176.520,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	-	100 Persen 100 Persen	1.224.489.596,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum														
			<i>Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan</i>	45 Kasus			141 Kasus	1.266.888.453,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	-	20 Kasus	666.312.971,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	35 Kasus			20 Kasus	616.288.067,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	-	15 Kasus	558.176.625,00	SEKRETARIAT DAERAH
6.	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Terkelolanya Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	100 Persen			100 Persen	2.956.572.138,00						100 Persen	2.925.000.000,00	
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Terkelolanya Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	100 Persen			100 Persen	899.999.902,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	-	100 Persen	1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen			1 Dokumen	599.999.964,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	-	1 Dokumen	650.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	2 Dokumen			1 Dokumen	299.999.938,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	-	1 Dokumen	350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Terkelolanya Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	100 Persen			100 Persen	800.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	-	100 Persen	625.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	2 Dokumen			1 Dokumen	216.470.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	-	1 Dokumen	175.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 Dokumen			1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	-	1 Dokumen	150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 Dokumen			1 Dokumen	383.530.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi	-	1 Dokumen	300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Terkelolanya Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	83,33 Persen			83,33 Persen	1.256.572.236,00			-	Penguatan Ekonomi	-	83,33 Persen	1.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	2 Dokumen			1 Dokumen	600.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	-	1 Dokumen	700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	2 Dokumen			1 Dokumen	326.572.236,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	-	1 Dokumen	150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.06.1.03.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	2 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	-	1 Dokumen	150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	2 Dokumen			1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	-	1 Dokumen	200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.03.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	2 Dokumen			1 Dokumen	80.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	-	1 Dokumen	100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
7.	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah	100 Persen			100 Persen	2.126.260.993,00						100 Persen	2.150.000.000,00	
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase terkelolanya pengadaan barang dan jasa	100 %			100 %	599.960.319,00			-	Peningkatan Tata Kelola	-	100 %	600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan			1 Laporan	149.982.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	1 Laporan	150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan			1 Laporan	299.999.974,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	1 Laporan	300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan			1 Laporan	149.977.945,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	1 Laporan	150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100 %			100 %	826.300.674,00			-	Peningkatan Tata Kelola	-	100 %	850.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	2 Laporan			1 Laporan	600.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	1 Laporan	600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan			1 Laporan	106.300.674,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	1 Laporan	150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan			1 Laporan	120.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	1 Laporan	100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Terbinanya dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100 %			100 %	700.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola	-	100 %	700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah O+A2922:12929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	300 ASN Orang			300 Orang	200.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	150 ASN Orang	200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	2 Dokumen			1 Dokumen	350.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	1 Dokumen	350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	2 Dokumen			1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	1 Dokumen	150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
8.	4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Rumusan Kebijakan Pembangunan Daerah Yang Dikendalikan	100 Persen			100 Persen	3.154.046.370,00						100 Persen	3.060.578.715,00	
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Evaluasi Pembangunan	100 %			100 %	920.578.136,00			-	Peningkatan Tata Kelola	-	100 %	1.060.578.715,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	2 Laporan			1 Laporan	373.242.462,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	1 Laporan	453.242.540,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	2 Laporan			1 Laporan	203.245.609,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	1 Laporan	253.245.770,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah</i>	2 Laporan			1 Laporan	344.090.065,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	1 Laporan	354.090.405,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	<i>Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah</i>	100 %			100 %	2.233.468.234,00			-	Peningkata n Tata Kelola	-	100 %	2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.02.0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan</i>	4 Dokumen			2 Dokumen	295.927.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	2 Dokumen	250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah</i>	2 Laporan			1 Laporan	459.999.921,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	1 Laporan	500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah</i>	2 Dokumen			2 Dokumen	1.477.540.833,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	1 Dokumen	1.250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						434.929.483,00							668.000.000,00	
	5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN						434.929.483,00							668.000.000,00	
1.	5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	<i>Persentase Terkelolanya Wilayah Perbatasan</i>	50 Persen			50 Persen	434.929.483,00						50 Persen	668.000.000,00	
	5.06.02.1.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	<i>Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama</i>	100 Persen			100 Persen	169.995.715,00			-	Peningkata n Tata Kelola	-	100 Persen	170.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	5.06.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan														
			<i>Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	169.995.715,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	-	1 Dokumen	170.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	5.06.02.1.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	<i>Persentase Terselesainya kewilayah di Lokasi Prioritas (Lokpri)</i>	100 Persen			100 Persen	264.933.768,00			-	Peningkata n Tata Kelola	-	100 Persen	498.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	5.06.02.1.02.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	2 Dokumen			1 Dokumen	129.983.678,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	1 Dokumen	130.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	5.06.02.1.02.0003	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	2 Dokumen			1 Dokumen	134.950.090,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	1 Dokumen	368.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	J U M L A H							371.225.780.715,00						363.482.555.465,00		



BAB V PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Pembangunan Daerah Provinsi Riau serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025. Dengan adanya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau ini, maka penetapan prioritas pembangunan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan. Untuk tahun 2025 Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau terdiri dari 9 Program, 32 Kegiatan dan 91 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 371.225.780.715,00 (Tiga ratus tujuh puluh satu milyar dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima belas rupiah).

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 selanjutnya menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Provinsi Riau dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya mental, semangat, kejujuran, dan disiplin pada pelaku pembangunan yang tetap harus dikedepankan.



5.3 Rencana Tindak Lanjut

Untuk mencapai target sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Riau yang telah ditetapkan pada tahun 2025 maka perlu didukung dengan program dan kegiatan. Agar program dan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan koordinasi lintas Unit Kerja/Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas.

Rencana Kerja ini disusun untuk memfasilitasi usulan rencana program dan pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 serta telah melalui mekanisme Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang. Dalam pelaksanaannya tetap harus mempedomani peraturan yang berlaku dan memperhatikan kondisi dan kemampuan Daerah pada tahun berjalan, dan apabila terdapat hal-hal yang belum sesuai kiranya dapat disesuaikan pada perubahan APBD Tahun 2025.

Rencana Kerja ini menjadi pedoman di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada Tahun 2025.

Pekanbaru, Juli 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI RIAU**

INDRA, SE., M. Si., MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19721115 199803 1 004



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jend.Sudirman No. 460 Telepon (0761) 31222, 33617, 33746, 33749 Fax. (0761) 33477

PEKANBARU

Kode Pos : 28126

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU Nomor : Kpts.

T E N T A N G TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan dalam rangka persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Riau tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024;
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 7);
9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 21);

10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 3);

11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Tim penyusun, sebagaimana dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

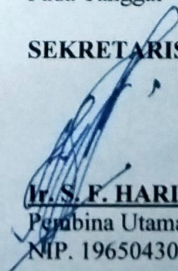
1. Mengumpulkan data dan informasi;
2. Menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada pimpinan.

KETIGA : Semua biaya yang timbul untuk pelaksanaan Surat Keputusan ini di bebaskan pada APBD Tahun 2024 Sekretariat Daerah Provinsi Riau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH


H. S. F. HARIYANTO, M.T

Perubina Utama

NIP. 19650430 198711 1 001

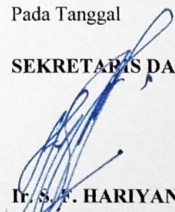
Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
 Nomor : Kpts.
 Tanggal :

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH
 PROVINSI RIAU TAHUN 2025**

NO	Nama/Jabatan	Instansi	Kedudukan dalam Tim
1	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	Pengarah
2	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	Pengarah
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Pengarah
4	Asisten Administrasi Umum	Sekretariat Daerah	Penanggung Jawab
5	Kepala Biro	Biro Administrasi Pimpinan	Ketua
6	Kepala Biro	Biro Umum	Wakil Ketua
7	Kepala Biro	Biro Organisasi	Wakil Ketua
8	Kepala Biro	Biro Pemerintahan dan Otonomi	Wakil Ketua
9	Kepala Biro	Biro Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua
10	Kepala Biro	Biro Hukum	Wakil Ketua
11	Kepala Biro	Biro Perekonomian	Wakil Ketua
12	Kepala Biro	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Wakil Ketua
13	Kepala Biro	Biro Administrasi Pembangunan	Wakil Ketua
14	Kepala Bagian Kepegawaian dan Perencanaan Sekretariat Daerah	Biro Administrasi Pimpinan	Sekretaris
15	TAKIMAH SUBHAYANO, S.IP, M. Si	Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Administrasi Pimpinan	Wakil Sekretaris
16	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Biro Administrasi Pimpinan	Anggota
17	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Biro Umum	Anggota
18	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Biro Organisasi	Anggota
19	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Biro Pemerintahan dan Otonomi	Anggota
20	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Biro Kesejahteraan Rakyat	Anggota
21	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Biro Hukum	Anggota
22	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perekonomian	Anggota
23	Kepala Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
24	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Biro Administrasi Pembangunan	Anggota
25	Indah Handayani, SE, M.Si	Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Administrasi Pimpinan	Anggota
26	Furqon, S.Pd	Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Administrasi Pimpinan	Anggota

Ditetapkan di Pekanbaru
 Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH


H. S. F. HARIYANTO, M.T
 Pribina Utama
 NIP. 19650430 198711 1 001

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025										

Organisasi : SEKRETARIAT DAERAH

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
SEKRETARIAT DAERAH														
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	01				SEKRETARIAT DAERAH									
4	01	02			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI									
4	01	02	1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan									
4	01	02	1.01	0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 179.342.117				Rp. 179.342.117	Rp. 215.210.769
4	01	02	1.01	0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 182.333.201				Rp. 182.333.201	Rp. 218.799.949
4	01	02	1.01	0003	Penataan Analisis Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 226.518.065				Rp. 226.518.065	Rp. 271.822.081
4	01	02	1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja									
4	01	02	1.02	0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 411.999.290				Rp. 411.999.290	Rp. 494.399.477
4	01	02	1.02	0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 429.965.468				Rp. 429.965.468	Rp. 515.958.598

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
4	01	02	1.02	0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 186.838.854				Rp. 186.838.854	Rp. 129.170.338
4	01	02	1.02	0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 194.454.817				Rp. 194.454.817	Rp. 220.861.157
4	01	02	1.02	0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 241.665.200				Rp. 241.665.200	Rp. 289.998.613
4	01	03			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH									
4	01	03	1.01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan									
4	01	03	1.01	0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 809.599.434				Rp. 809.599.434	Rp. 809.600.000
4	01	03	1.01	0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 459.799.964				Rp. 459.799.964	Rp. 459.800.000
4	01	03	1.01	0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 833.029.940	Rp. 150.000.000			Rp. 983.029.940	Rp. 350.000.000
4	01	03	1.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah									
4	01	03	1.02	0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 387.364.288				Rp. 387.364.288	Rp. 387.364.520
4	01	03	1.02	0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 413.819.745				Rp. 413.819.745	Rp. 413.820.000
4	01	03	1.02	0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.103.519.881				Rp. 1.103.519.881	Rp. 1.103.520.000
4	01	03	1.03		Fasilitasi Kerja Sama Daerah									
4	01	03	1.03	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 505.780.000				Rp. 505.780.000	Rp. 505.780.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
4	01	03	1.03	0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 183.919.734				Rp. 183.919.734	Rp. 183.920.000
4	01	03	1.03	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 167.199.679				Rp. 167.199.679	Rp. 167.200.000
4	01	04			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT									
4	01	04	1.01		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual									
4	01	04	1.01	0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 13.796.194.010				Rp. 13.796.194.010	Rp. 25.000.000.000
4	01	04	1.01	0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 20.660.501.000				Rp. 20.660.501.000	Rp. 21.000.000.000
4	01	04	1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar									
4	01	04	1.02	0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 98.499.960.594				Rp. 98.499.960.594	Rp. 100.500.000.000
4	01	04	1.02	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 299.999.999				Rp. 299.999.999	Rp. 330.000.000
4	01	04	1.02	0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 15.851.699.956	Rp. 130.500.000			Rp. 15.982.199.956	Rp. 12.807.000.000
4	01	04	1.03		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar									
4	01	04	1.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 362.326.600				Rp. 362.326.600	Rp. 375.000.000
4	01	04	1.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 375.000.000				Rp. 375.000.000	Rp. 380.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
4	01	06	1.02	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 216.470.000				Rp. 216.470.000	Rp. 175.000.000
4	01	06	1.02	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 200.000.000				Rp. 200.000.000	Rp. 150.000.000
4	01	06	1.02	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 383.530.000				Rp. 383.530.000	Rp. 300.000.000
4	01	06	1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD									
4	01	06	1.03	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 600.000.000				Rp. 600.000.000	Rp. 700.000.000
4	01	06	1.03	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 326.572.236				Rp. 326.572.236	Rp. 150.000.000
4	01	06	1.03	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	Rp. 150.000.000
4	01	06	1.03	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 150.000.000				Rp. 150.000.000	Rp. 200.000.000
4	01	06	1.03	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 80.000.000				Rp. 80.000.000	Rp. 100.000.000
4	01	07			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA									
4	01	07	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa									
4	01	07	1.01	0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 149.982.400				Rp. 149.982.400	Rp. 150.000.000
4	01	07	1.01	0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 299.999.974				Rp. 299.999.974	Rp. 300.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
4	01	07	1.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 149.977.945				Rp. 149.977.945	Rp. 150.000.000
4	01	07	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik									
4	01	07	1.02	0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 576.400.000	Rp. 23.600.000			Rp. 600.000.000	Rp. 600.000.000
4	01	07	1.02	0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 106.300.674				Rp. 106.300.674	Rp. 150.000.000
4	01	07	1.02	0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 120.000.000				Rp. 120.000.000	Rp. 100.000.000
4	01	07	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa									
4	01	07	1.03	0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 200.000.000				Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000
4	01	07	1.03	0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 350.000.000				Rp. 350.000.000	Rp. 350.000.000
4	01	07	1.03	0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 150.000.000				Rp. 150.000.000	Rp. 150.000.000
4	01	08			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN									
4	01	08	1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah									
4	01	08	1.01	0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 373.242.462				Rp. 373.242.462	Rp. 453.242.540
4	01	08	1.01	0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 203.245.609				Rp. 203.245.609	Rp. 253.245.770
4	01	08	1.01	0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 344.090.065				Rp. 344.090.065	Rp. 354.090.405

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
4	01	08	1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah									
4	01	08	1.02	0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 295.927.480				Rp. 295.927.480	Rp. 250.000.000
4	01	08	1.02	0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 459.999.921				Rp. 459.999.921	Rp. 500.000.000
4	01	08	1.02	0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.477.540.833				Rp. 1.477.540.833	Rp. 1.250.000.000
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa		Rp. 644.800.000				Rp. 644.800.000	Rp. 300.000.000
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
4	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa		Rp. 74.758.076.829				Rp. 74.758.076.829	Rp. 78.512.955.746
4	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa		Rp. 261.500.000	Rp. 165.000.000			Rp. 426.500.000	Rp. 426.500.000
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
4	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa		Rp. 115.000.000				Rp. 115.000.000	Rp. 116.950.000
4	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa		Rp. 240.000.000				Rp. 240.000.000	Rp. 250.000.000
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
4	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa		Rp. 587.247.636	Rp. 12.750.000			Rp. 599.997.636	Rp. 650.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa			Rp. 2.032.849.901			Rp. 2.032.849.901	Rp. 2.050.000.000
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa		Rp. 3.146.708.109				Rp. 3.146.708.109	Rp. 1.800.000.000
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa		Rp. 1.098.381.470				Rp. 1.098.381.470	Rp. 950.000.000
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 7.688.675.000				Rp. 7.688.675.000	Rp. 6.000.000.000
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
4	01	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa			Rp. 322.100.000			Rp. 322.100.000	Rp. 2.000.000.000
4	01	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa			Rp. 16.080.180.000			Rp. 16.080.180.000	Rp. 2.000.000.000
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa		Rp. 11.999.999.994				Rp. 11.999.999.994	Rp. 8.700.000.000
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa		Rp. 20.080.170.528				Rp. 20.080.170.528	Rp. 19.730.012.608
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa		Rp. 1.197.440.000				Rp. 1.197.440.000	Rp. 1.000.000.000
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa		Rp. 5.561.260.000				Rp. 5.561.260.000	Rp. 3.350.000.000
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa		Rp. 2.743.734.500	Rp. 34.709.280			Rp. 2.778.443.780	Rp. 2.100.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
4	01	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa		Rp. 6.483.669.000				Rp. 6.483.669.000	Rp. 5.400.000.000
4	01	01	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
4	01	01	1.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa		Rp. 271.154.327				Rp. 271.154.327	Rp. 271.154.327
4	01	01	1.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa		Rp. 460.000.000				Rp. 460.000.000	Rp. 460.000.000
4	01	01	1.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa		Rp. 48.000.000				Rp. 48.000.000	Rp. 48.000.000
4	01	01	1.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa		Rp. 8.371.000.000				Rp. 8.371.000.000	Rp. 16.573.500.000
4	01	01	1.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah									
4	01	01	1.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa		Rp. 6.485.850.658	Rp. 663.000.000			Rp. 7.148.850.658	Rp. 4.600.000.000
4	01	01	1.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa		Rp. 5.770.852.458	Rp. 655.000.000			Rp. 6.425.852.458	Rp. 3.700.000.000
4	01	01	1.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa		Rp. 1.543.622.000				Rp. 1.543.622.000	Rp. 750.000.000
4	01	01	1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan									
4	01	01	1.13	0001	Penyiapan Materi Pimpinan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 621.999.975				Rp. 621.999.975	Rp. 280.000.000
4	01	01	1.13	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 450.000.000				Rp. 450.000.000	Rp. 500.000.000
4	01	01	1.13	0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.550.998.080	Rp. 249.001.920			Rp. 4.800.000.000	Rp. 4.900.000.000
4	01	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan									
4	01	01	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 9.291.891.169				Rp. 9.291.891.169	Rp. 7.700.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
4	01	01	1.14	0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.399.998.540				Rp. 5.399.998.540	Rp. 8.500.000.000
4	01	01	1.14	0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.999.998.590				Rp. 1.999.998.590	Rp. 1.150.000.000
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	06				PENGLOLAAN PERBATASAN									
5	06	02			PROGRAM PENGLOLAAN PERBATASAN									
5	06	02	1.01		Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama									
5	06	02	1.01	0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 169.995.715				Rp. 169.995.715	Rp. 170.000.000
5	06	02	1.02		Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan									
5	06	02	1.02	0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 129.983.678				Rp. 129.983.678	Rp. 130.000.000
5	06	02	1.02	0003	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 134.950.090				Rp. 134.950.090	Rp. 368.000.000
Jumlah									Rp. 350.707.089.614	Rp. 20.518.691.101			Rp. 371.225.780.715	Rp. 363.482.555.465
								Provinsi Riau..... Sekretaris Daerah  Y. S. F. HARIYANTO, MT NIP. 196504301987111001						

TABEL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1.	BAB I	PENDAHULUAN			
	1.1. Latar Belakang	Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD	V		Sesuai
	1.2 Dasar Hukum	Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.		V	Agar memuat Peraturan sebagai berikut pada dasar hukum : a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang e. Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026 f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
					2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. i. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau j. Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 k. Silahkan sesuaikan terkait aturan teknis lainnya.
	1.3 Maksud dan Tujuan	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.	V		sesuai
	1.4 Sistematika Penulisan	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.	V		sesuai
2.	BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023			
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat	Berisikan uraian mengenai : 1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 3. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang	V		Sesuai Tabel T-C. 29 telah tersaji dalam Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2023

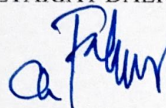
NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
	Daerah	direncanakan; 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan; 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut; dan 7. Sajikan Tabel T-C.29			
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	1. Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK; 2. Sajikan Tabel T-C.30	V		Sesuai Tabel T-C. 30 telah tersaji dalam Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Berisikan uraian mengenai : 1. Tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD; 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD; 3. Dampaknya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (<i>Sustainable Development Goals</i>); 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tahun yang direncanakan			
	2.4 Review terhadap RKPD	Berisikan uraian mengenai : 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;			

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
		3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat didalam RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan 4. Sajikan Tabel T-C.31			
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Masyarakat	Berisikan uraian mengenai : 1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan/sub kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; 3. Sajikan Tabel T-C.32			
3	BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH			
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	Berisikan uraian mengenai : Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah		V	Tambahkan data terkait Keselarasan Program Nasional dan Program Prioritas dengan Program Daerah (table terlampir pada lembar panduan penyusunan dokumen Renja)
	3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	Berisikan uraian mengenai : 1. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah; 2. Target Indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah pada Renja berdasarkan Renstra Perangkat Daerah.	V		
	3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Berisikan uraian mengenai : 1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan; 2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program,	V		

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
		kegiatan dan sub kegiatan; 3. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program, kegiatan dan sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya dan 4. Sajikan Tabel T-C.33			
4	BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH			
		Berisikan uraian mengenai : Hasil inputan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan pada SIPD RI sesuaikan target indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan RKPD	V		Sesuaikan pagu/ pendanaan dengan inputan terakhir pada system SIPD
5	BAB V	PENUTUP			
		Berisikan uraian mengenai : 1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; 2. Kaidah-kaidah pelaksanaan; 3. Rencana tindak lanjut; 4. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah , serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.	V		
6	LAMPIRAN	1. Format pemetaan program/kegiatan/sub kegiatan renstra perangkat daerah tahun 2025-2026 dengan program/kegiatan/sub kegiatan SIPD-RI (Renja 2025) 2. SK Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025		V	Lengkapi lampiran sesuai dengan keterangan yang di minta

Pekanbaru, Juni 2024

PERANGKAT DAERAH :
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU



KHOIRIL FAHMI, S.Sos, M.Si
NIP. 197601202000031002

Fungsional Perencana Ahli Muda



TAKIMAH SUBHAYANO, S.IP
NIP. 198801042007011003

Mengetahui,
KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
BAPPEDALITBANG PROVINSI RIAU

RAJA JUARISMAN, ST, M.Si
NIP. 19770611 200012 1 002

Verifikator :

1. NAMA : HERYANTO, S.Hut, MT ()
NIP : 19711126 199803 1 006
2. NAMA : ARI DIANUARI ()
NIP : 19810103 200901 1 002